

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu keharusan dalam kehidupan politik yang demokratis, karena pemilu dapat dijadikan sebagai sarana atau barometer untuk mengukur kadar demokratis sebuah negara. Hampir semua ilmuwan politik sepakat bahwa untuk menentukan demokrasi dan tidaknya suatu negara dapat diukur antara lain dari ada tidaknya pemilu yang mengabsahkan pemerintahan itu. Walaupun pada realitasnya ada negara-negara yang melaksanakan pemilu hanya sekedar formalitas politik belaka karena takut dicap tidak demokratis.

Mencermati praktek pemilu dalam sistem politik modern, kita dapat membedakannya ke dalam dua tipe, yaitu : pemilu sebagai alat demokrasi dan pemilu sebagai formalitas politik.

Sebagai alat demokrasi, pemilu dijalankan secara jujur, adil, bebas, dan kompetitif. Pemerintahan yang menyelenggarakan pemilu bahkan kerap mesti menerima kenyataan bahwa pemilu yang mereka jalankan justru menjatuhkan mereka dari tampuk kekuasaan, dan memakzulkan kelompok politik lain yang dikehendaki rakyat. Dalam keadaan ini pemilu benar-benar bias menjadi alat

Sebaliknya, sebagai formalitas politik, pemilu hanya dijadikan alat legitimasi pemerintahan non demokrasi. Pemilunya sendiri dijalankan secara tidak demokratis.

Kemenangan satu kontestan lebih merupakan hasil rekayasa kekuasaan ketimbang hasil pemilihan politik rakyat. Pemenang pemilu terkadang sudah diketahui sebelum pemilunya berlangsung. Tentu saja sistem politik yang menjalankan sulit dikategorikan demokratis. Kecenderungan pemilu dilaksanakan hanya sebagai formalitas politik, banyak ditemukan dalam negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga. Studi perbandingan politik Clark, sebagai contoh yang cukup representatif, sampai pada kesimpulan bahwa sulit menemukan pemilu yang sepenuhnya bersih di dunia ketiga. Pemilunya masih menunjukkan pengingkaran yang jelas terhadap martabat manusia dan karenanya kurang bahkan tidak demokratis.¹

Sehubungan dengan pendapat di atas, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana dengan Indonesia? Indonesia yang tergolong sebagai negara dunia ketiga, secara substansial masyarakatnya telah akrab dengan pemilu. Masa Orde Baru Indonesia telah berhasil melaksanakan pemilu sebanyak enam kali secara berkala. Sebelumnya, pada demokrasi parlementer (liberal), Indonesia telah menyelenggarakan pemilu satu kali yaitu tahun 1955, ditambah dengan Orde reformasi yang telah melaksanakan pemilu 2 kali (tahun 1999 dan 2004). Sehingga secara keseluruhan, sejak memproklamkan kemerdekaan Indonesia sampai Orde reformasi Indonesia telah menyelenggarakan sembilan kali pemilu, sebuah hitungan yang cukup matang untuk belajar berdemokrasi.

Menyinggung hubungan pemilu dan demokrasi, dari sembilan kali pemilu yang dilaksanakan Indonesia banyak anggapan hanya pemilu pada Orde reformasilah yang paling demokratis, jika dibandingkan dengan tujuh kali pemilu pada masa sebelumnya. Karena pemilu Orde reformasi yang berlangsung dalam suasana multi partai bisa dikatakan otonomi dan kekuatan dari partai politik diakui dan berfungsi. Pemilu sebagai lembaga kehidupan politik demokratispun dihargai dan berwenang secara mandiri. Sehingga fungsinya menjembatani kedaulatan rakyat dan kekuasaan negara terlaksana secara efektif. Sehingga pemilu Orde reformasi mampu mewedahi kekuasaan partai sambil memberi kesempatan kepada rakyat untuk mewujudkan kedaulatannya. Rakyat diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menyalurkan aspirasinya di dalam memilih wakilnya untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat (legislatif) karena di dalam Orde reformasi menganut asas jurdil (jujur, adil) dan luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia).

Lain halnya dengan pemilu-pemilu Orde Baru dimana obsesi awalnya adalah pembangunan ekonomi dan stabilitas politik, telah membawa pengaruh yang besar terhadap sistem kepartaian di Indonesia. Diantaranya yaitu perlunya membatasi jumlah partai politik dan menjaga stabilitas politik dan pemerintahan supaya kebijakan pembangunan ekonomi dapat ditegakkan dan mengurangi polarisasi ideologi masyarakat dan sistem kepartaian.

Pembatasan terhadap jumlah partai politik dilakukan oleh rezim Orde Baru setelah dilangsungkan pemilu pertama tahun 1971, yang dimenangkan oleh Golongan Karya yaitu sebuah organisasi politik yang usianya masih muda namun mendapat dukungan dari militer dan pemerintahan. Partai yang

fusi menjadi dua partai, yakni NU, PSSI, Perti, dan Parmusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan PNI, Parkindo, Partai Katholik, IPKI, dan Murba menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sehingga pada pemilu 1977 hanya diikuti oleh tiga OPP, yaitu PPP, Golkar, dan PDI.

Kemudian melalui asas tunggal (menjelang pemilu 1982) kedua partai politik tersebut beserta organisasi-organisasi politik dan kemasyarakatan lainnya harus mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas, sebelumnya melalui masa mengambang pemerintah telah melarang aktivitas partai politik di desa untuk menghilangkan politik partisipan di luar periode kampanye pemilu.

Memang pada awalnya semua partai politik ada semacam pembebasan bagi tiap-tiap partai politik untuk menjadi sama besar. Akan tetapi dalam proses selanjutnya dengan dikuasai khususnya sumber keuangan negara ditangan eksekutif, kedua partai politik (PPP dan PDI) hanya sekedar menjadi simbol keberadaan beberapa partai. Pertentangan intern dalam tubuh partai hanyalah memberikan peluang bagi Golkar untuk semakin besar.

Selanjutnya berbagai perundang-undangan yang disusun khususnya Undang-undang partai politik dan Golkar seluruhnya itu ditujukan untuk memenangkan pemilu secara mutlak di tangan satu partai. "Pemilu tidak mungkin dilaksanakan secara jujur dan demokratis, undang-undang pemilu memang dirancang untuk itu", Sri Bintang Pamungkas.² Memang tidak salah apa yang dikatakannya pemilu dirancang, diselenggarakan dan diawasi oleh panitia yang seluruhnya berasal dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun

² Sri Bintang Pamungkas. "Format Reformasi Politik Menuju Masyarakat Sipil Berdaulat, Agenda

daerah. Bahkan mengingat pelaksanaan di lapangan aparat-aparat pemerintah dari Golkar ikut serta menyelenggarakan kepanitiaan pemilu, maka pemilu sudah bisa dipastikan tidak akan pernah berlangsung secara jujur, adil dan memenuhi prinsip-prinsip demokrasi. Dengan pemilu semacam itu, terwujudlah jaminan bagi Golkar untuk menang dalam setiap pemilu. Hal ini terbukti sejak pemilu 1971-1997, Golkar selalu keluar sebagai pemenang, sementara kedua partai lainnya, suaranya jauh terpaut dibelakang. Hal ini sekaligus memposisikan Golkar sebagai pemenang suara mayoritas di parlemen yang tanpa tertandingi oleh dua Partai Politik lainnya, yakni PPP dan PDI.

Persoalan yang menyangkut kinerja sistem kepartaian di Indonesia semakin kentara dan mencuat ke permukaan penghujung kekuasaan Orde Baru. Sebagai pemasok wakil rakyat kelembagaan perwakilan politik, masalah mendasar yang dihadapi partai politik dan sistem kepartaian adalah belum bekerjanya berbagai mekanisme demokrasi, baik dalam tubuh partai sebagai suatu unit maupun dalam suatu sistem kepartaian. Sehingga banyak kalangan masyarakat berpendapat bahwa partai politik masa Orde Baru tidak mampu untuk mengaktualisasikan aspirasi dalam masyarakat.

Berkaitan dengan fenomena tersebut, muncullah gagasan di masyarakat tentang pendirian partai politik baru. Pembentukan partai politik baru dirasa penting dalam rangka penciptaan saluran aspirasi dan kepentingan politik selain tiga OPP : PPP, Golkar, dan PDI. Selain itu pembentukan partai politik baru relevan bagi perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia. Dilihat dari fungsi sistem kepartaian dan perwakilan politik yang pernah

... ..

supaya partai politik dan sistem kepartaian lebih responsif terhadap aspirasi dan perkembangan masyarakat.

Sementara disisi lain krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak kunjung berhenti bahkan sudah menjalar pada krisis sosial politik, yang menggiring masyarakat kepada titik tidak percaya kepada rezim yang berkuasa, karena dianggap tidak mampu untuk mengatasinya. Hal ini juga yang menjadi berat bagi rezim Orde Baru di penghujung kekuasaannya. Sehingga ketika gelombang reformasi bergulir, rezim Orde Baru mirip dengan sebuah pasukan perang yang kehabisan amunisi, sementara lawan terus-menerus menggempur daerah sasaran, maka tidak ada jalan lain kecuali menyerah.

Sejalan dengan tumbangnyanya rezim Orde Baru yang ditrandai dengan mundurnya HM Soeharto, dari jabatan Presiden RI setelah berkuasa selama 32 tahun, telah membawa dampak terhadap kehidupan politik yang salah satunya adalah diterapkannya sistem multi partai dalam pemilu Indonesia, dan sekarang masuk ke fase transisional yang pelik.

Dapat dikatakan, hari ini kita berada dalam fase setelah masa otoritarian yang represif dan monolit, entah menuju ke mana. Pijakan kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami kerapuhan. Sementara masa yang akan datang masih merupakan kabut pekat yang diwarnai oleh persaingan dan kompetisi politik berbagai kekuatan dan kelompok kepentingan yang masing-masing sedang bergiat melakukan reposisi.

Kita berada dalam pertarungan sejarah yang akan menentukan baik-buruk, gagal-berhasil, serta suram-gemilangnya bangsa Indonesia di masa mendatang. Hancurnya perekonomian nasional, munculnya berbagai perilaku

kekerasan massal, baik antar kelompok kekuatan, maupun yang mengarah kepada kekerasan antar etnik, dan bahkan antar agama, menandai era transisi yang semuanya hanya menunjukkan bahwa integrasi bangsa yang plural yang sedang mengalami kerenggangan ikatan.

Tuntutan demokrasi yang saat ini identik dengan demonstrasi kekuatan massa, mengasumsikan masih mampatnya saluran-saluran dialog politik yang setara antara kekuatan yang mengendalikan kekuasaan, dan kekuatan aspiratif masyarakat yang memancang tujuan-tujuan ideal.

Dalam situasi semacam itulah pemilu 7 Juni 1999 disepakati sebagai pilihan untuk menyelesaikan kemelut yang sedang berlangsung. Berbagai varian persoalan menjelang persiapan pelaksanaan pemilu pun nampak ke permukaan. Persaingan antar partai politik, baik yang merupakan bagian determinasi kekuatan *status quo* melawan pembaru, maupun persaingan antar politik yang secara terbuka mulai berebut simpati massa, berlangsung di bawah bayang-bayang permainan kekuatan yang tidak menghendaki berlangsungnya pemilu.

Suhu politik berada dalam titik kulminasi. Sementara disisi lain, tingkat kesulitan hidup yang dialami masyarakat semakin melampaui batas kemampuan ketahanan krisis yang dimiliki. Sukses pemilu 1999 sebagai salah satu harapan terwujudnya sebuah tata kehidupan masyarakat Indonesia baru yang demokratis dalam menghadapi batu ujian yang sangat varian.

Dengan melihat gambaran diatas maka penulis mengambil studi kasus Partai Amanat Nasional (PAN) dalam eksistensinya dalam dunia perpolitikan di Indonesia dengan mengacu pada perolehan suara Partai Amanat Nasional

kepartaian pada Orde reformasi dan merupakan salah satu partai terbesar pada pemilu saat ini.

Untuk meningkatkan eksistensi Partai Amanat Nasional (PAN) diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan hasil perolehan suara pada pemilu legislatif 2004 dengan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi politik aktif, penuh dan bertanggung jawab. Maka dari itu diharapkan Partai Amanat Nasional (PAN) dapat tampil sebagai salah satu kekuatan politik alternatif yang bisa mewujudkan kehidupan politik yang demokratis, ada tiga argumentasi mengenai hal itu :

1. Secara komitmen ideologi.

Partai Amanat Nasional (PAN) dapat diharapkan komitmen perjuangannya, gagasan tentang inklusifikasi-pluralitas dan tidak berdasar ideologi tertentu maka Partai Amanat Nasional (PAN) dapat lebih tegas, terbuka, artikulatif dan demokratis dalam merumuskan dan mengajukan agenda tuntutan dan keprihatinan masyarakat yang tidak terakomodasi dalam saluran resmi kekuasaan.

2. Partai Amanat Nasional (PAN) dengan bentuk yang khas³ dapat menjadi wahana atau penghubung yang efektif antara berbagai kepentingan di masyarakat atau Partai Amanat Nasional (PAN) bisa berfungsi sebagai sarana artikulasi kepentingan rakyat dan sistem politik.

3. Secara kapasitas figur Organisasi tidak bisa dipungkiri bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) identik dengan tokoh politik, tokoh Nasional

³ Tidak pernah mengatakan bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) adalah partai eksperimen di Indonesia untuk menuju demokrasi, dikarenakan ciri kelembagaan (partai politik) yang khas

dan tokoh reformasi Prof. Dr. H.M. Amien Rais, di samping itu juga jajaran pimpinan-pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN) cukup berkualitas sumber daya manusianya serta cukup mempunyai konsistensi terhadap amanat reformasi sehingga diharapkan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) melalui gagasan, ide-ide, pendapat serta seruannya diharapkan dapat menciptakan kehidupan politik di Indonesia dapat berjalan secara demokratis.

Pada Pemilu 1999, PAN kabupaten Sleman menempati peringkat ke dua setelah PDI-P, dengan jumlah perolehan suara sebanyak 98.495 suara atau 18,79 %, sehingga dapat menempatkan anggota legislatifnya sebanyak 8 orang. Pada Pemilu 2004 terjadi penurunan jumlah kursi di DPRD Sleman dari 8 kursi menjadi 7 kursi lebih disebabkan faktor strategi, karena secara prosentase PAN justru mengalami kenaikan di bandingkan dengan Pemilu 1999. hanya karena sistem Pemilu yang berubah dimana PAN banyak kehilangan kesempatan meraih kursi. Suara sekitar 20 ribu yang tidak terwakili oleh karena sisa suara PAN dikalahkan oleh partai lain. Minimal kehilangan 3 kursi dari Dapel 2, Dapel 5 dan Dapel 6. Disamping itu PAN juga kehilangan suara yang besar dikantong-kantong utama pemilu 1999 seperti di kecamatan Depok dan Melati. Agar semua itu dapat terwujud diperlukan eksistensi Partai Amanat Nasional dalam konsiliasi (pemetaan) politik di Indonesia sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia. Karena semakin kuat eksistensi Partai Amanat Nasional (PAN) akan dapat mempengaruhi terhadap kebijakan politik di negara Indonesia. Dan hal

Amanat Nasional (PAN) pada pemilu terutama pemilu legislatif 2004. Sehingga kasus di Sleman sangat menarik sekali karena Sleman merupakan basis Partai Amanat Nasional (PAN) terbesar di wilayah Yogyakarta, mayoritas penduduknya adalah simpatisan PAN terutama generasi muda seperti mahasiswa yang bergerak dibidang politik. Dan juga Partai Amanat Nasional adalah partai politik yang bersifat terbuka dan mandiri menjulang tinggi moralitas agama, kemanusiaan dan kemajemukan, oleh karena itu Partai Amanat Nasional sangat kuat sekali di Sleman.

A. Rumusan Masalah

Dalam uraian yang di rumuskan di dalam latar belakang masalah diatas maka timbul permasalahan sebagai berikut : **Strategi apakah yang diterapkan oleh Partai Amanat Nasional dalam meningkatkan perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2004 di Kabupaten Sleman?**

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui strategi yang diterapkan oleh Partai Amanat Nasional

1. Untuk mengetahui permasalahan suara pada Pemilu Legislatif 2004 di

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan masukan kepada Partai Amanat Nasional (PAN) yang berkaitan dengan strategi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam meningkatkan perolehan suara sehingga dapat meningkatkan perolehan suaranya pada pemilu yang akan datang.
2. Menambah khasanah kajian dan kepustakaan yang berkaitan dengan politik terutama tentang strategi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam meningkatkan perolehan suara.
3. Menambah wawasan pengetahuan penulis tentang politik.
4. Dapat menjadi bahan kajian bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama politik di masa yang akan datang.

D. Kerangka Dasar Teori Penelitian

1. Demokrasi dan Demokratisasi

Dalam teori-teori politik banyak macam dan ragamnya sistem politik di dunia ini, akan tetapi pada dasarnya variasi sistem ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem politik yang otoriter dan sistem politik yang demokratis. Oleh karena itu tidak sedikit negara yang berusaha menerapkan sistem politik demokrasi dalam negaranya.

a. Makna Demokrasi

Sudah menjadi rahasia umum bahwa demokrasi secara harfiah berasal dari dua kata, yaitu *demos* berarti rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan. Oleh karena itu, demokrasi mengandung arti

pemerintahan rakyat atau pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi pada rakyat.⁴

Untuk memberi makna atau pengertian yang jelas terhadap kekuasaan tertinggi pada rakyat telah banyak penulis yang mengeluarkan teori-teori demokrasi. Bahkan hampir setiap penulis memberikan definisi atau ciri demokrasi yang berbeda walaupun pada dasarnya tetap sama. Huntington misalnya, menyebutkan sistem politik dapat disebutkan demokratis sejauh para pembuat keputusan yang kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala dan di dalam sistem itu para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara, dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberi suara.⁵ Disamping itu juga demokrasi mengimplikasikan kebebasan sipil dalam politik, yaitu kebebasan untuk berbicara, menerbitkan, berkumpul dan berorganisasi yang dibutuhkan bagi perdebatan politik dan pelaksanaan kampanye pemilu.⁶

Dengan berlandaskan pada pendapat Huntington diatas, jelaslah bahwa dalam negara demokratis, untuk pengisian anggota Legeslatif maupun jabatan Eksekutif harus melalui pemilihan umum yang demokratis. Dikatakan untuk pengisian anggota legeslatif maupun jabatan eksekutif sebab kedua lembaga ini merupakan pembuatan keputusan y paling kuat dalam sebuah sistem politik.

⁴ Sukarna *Kekuasaan Kediktatoran dan Demokrasi Alumni Bandung*, 1974, hal 27.

Sementara itu, S.M. Lipset memberikan gambaran tentang tiga syarat pokok substansial demokrasi.⁷ *Pertama*, kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas antara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi tertentu (terutama parpol) untuk memperebutkan jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan efektif, pada jangka waktu yang reguler dan tak menggunakan daya paksa. *Kedua*, partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijaksanaan, paling tidak melalui pemilu yang diselenggarakan secara reguler dan adil sedemikian rupa sehingga tidak satupun, kelompok sosial yang dikecualikan. *Ketiga*, tingkat kebebasan sipil dalam politik, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam organisasi yang cukup untuk menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik.

Sedangkan menurut Afan Gaffar, demokrasi dalam arti prosedural harus mengandung elemen-elemen sebagai berikut⁸ : *Pertama*, adanya kemungkinan rotasi kekuasaan. Dalam negara demokratis peluang rotasi kekuasaan harus ada. Rotasi kekuasaan terjadinya pergantian pemerintahan secara teratur dengan cara yang damai dari satu pemerintah ke pemerintah lainnya, dari satu penguasa ke penguasa lainnya. Baik dari kalangan parpol yang sama maupun parpol yang memenangkan pemilu.

⁷ Dalam Muchtar Masoed : *Negara Kapital dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994, hal 4.

⁸ A. G. Gaffar, *State, Capitalism, Democracy and the Development of Democracy in Indonesia*, 1998

Kedua, adanya akuntabilitas para pemegang kekuasaan baik yang terdapat dalam lembaga legislatif maupun eksekutif. Dalam negara demokratis setiap jabatan yang dipilih oleh rakyat, harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan apa yang dipilihnya ataupun tidak dipilihnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Akuntabilitas juga menyangkut perilaku pejabat sebagai publik figur yang menjadi suri tauladan bagi masyarakat.

Ketiga, rekrutmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan maka diperlukan sistem rekrutmen politik yang terbuka, dalam arti setiap orang yang memenuhi syarat untuk memegang sebuah jabatan politik mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk berkompetisi guna mengisi jabatan tersebut.

Keempat, masyarakat menikmati secara nyata hak-hak dasarnya, seperti hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk berpendapat dan menyatakan keinginan dan lainnya.

Kelima, adanya pemilu yang teratur dan bebas. Maksudnya adalah bahwa pemilu dilaksanakan secara berkala, jujur dan adil, tidak ada intimidasi dari pemerintah maupun kecurangan-kecurangan lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi golongan tertentu.

Pendapat-pendapat yang diungkapkan di atas menunjukkan betapa bervariasinya ciri-ciri demokrasi yang digambarkan oleh para penulis. Setiap penulis bias saja muncul dengan ciri-cirinya sendiri namun tidak akan lepas dari dua konsep penting dalam demokrasi yaitu kebebasan/kesamaan dan kedaulatan rakyat disamping

sehingga kepatuhan rakyat terhadap kebijakan pemerintah adalah kepatuhan terhadap mereka sendiri. Dengan demikian kekuasaan yang besar yang dimiliki pemerintah sebenarnya adalah kekuasaan yang bertujuan untuk mencapai kepentingan rakyat. Dengan mekanisme seperti ini dapat dicapai dua hal : *pertama*, kecilnya kemungkinan terjadinya penyelewengan kekuasaan oleh pemerintah dan, *kedua*, terjaminnya kepentingan rakyat dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.

Perwujudan konsep kedaulatan rakyat dalam dunia politik nyata adalah dipegangnya kekuasaan legislatif oleh lembaga perwakilan rakyat (parlemen). Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, parlemen bekerja sama dengan lembaga eksekutif (pemerintah) sehingga kebijakan pemerintah setepat-tepatnya dapat dihasilkan. Disamping itu, parlemen dapat juga melaksanakan fungsi pengawasan langsung terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat dapat dicegah. Bila dilanggar, lembaga legislatif dapat menjatuhkan sanksi terhadap pemerintah dalam bentuk jatuhnya kabinet atau turunnya presiden dari jabatannya.

b. Demokratisasi : Transisi Menuju Demokrasi

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa sistem politik demokrasi lebih baik dibandingkan dengan sistem politik otoriter. Oleh karena itu tidak sedikit negara yang berusaha mengganti sistem otoriternya oleh sistem demokrasi. Proses digantinya

pemerintah/sistem politik yang otoriter dengan pemerintahan yang demokratis inilah yang disebut demokratisasi.⁹

Demokratisasi merupakan sebuah proses tanpa akhir, karena negara demokratis seperti yang diinginkan oleh teori demokrasi tidak akan pernah dihasilkan. Menurut Maswadi Rauf, kedaulatan yang sesungguhnya tidak pernah akan tercapai karena selalu saja ada kemungkinan masuknya unsur-unsur kepentingan kelompok tertentu di dalam kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan rakyat akibatnya kedaulatan rakyat tidak berlaku sepenuhnya.¹⁰

Karena itu tujuan demokratisasi adalah menegakkan semakin banyak nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan politik. Yang penting dalam demokratisasi adalah kepercayaan pemerintah dan rakyat bahwa demokrasi adalah nilai-nilai politik yang mereka inginkan bersama.

Demokratisasi merupakan proses yang tidak pernah selesai untuk menuju titik demokrasi. Karena itu demokratisasi mempunyai tiga ciri¹¹ utama yaitu : *pertama*, suatu proses yang tidak pernah selesai. *Kedua*, demokratisasi adalah evolusioner. Demokratisasi seharusnya berjalan secara perlahan, bukan cepat sekaligus membongkar sampai ke dasar. *Ketiga*, demokratisasi adalah perubahan secara persuasif.

Dalam usaha-usaha demokratisasi, sebuah negara bisa saja mengalami kemajuan sewaktu-waktu bisa mengalami kemunduran, perkembangan-perkembangan yang tidak menguntungkan

⁹ Huntington, *op cit*, hal 8.

¹⁰ Maswadi Rauf, *Demokrasi dan Pembangunan*, PUSIP UII, Jakarta, 1998, hal 23

demokratisasi, ini berarti demokratisasi bukan seperti tangga, semakin lama semakin demokratis, akan tetapi merupakan sebuah proses tanpa akhir. Hal ini disebabkan oleh karakteristik demokratisasi itu sendiri. Dalam proses transisi menuju demokrasi biasanya sebuah masyarakat mengalami situasi chaos sebagai fase dari proses transisi tersebut. Bukti-bukti yang terjadi di negara-negara maju menunjukkan terjadinya tahapan seperti itu dalam masa-masa awal menuju negara demokrasi.

Tawar-menawar antar kepentingan yang terjadi di antara kelompok masyarakat sulit menentukan titik kompromi hingga mengarah pada terjadinya benturan dan akhirnya mengalami fluktuasi hingga titik yang paling ekstrim. Pada saat itu masyarakat dituntut menentukan pilihannya sendiri sehubungan dengan format sistem sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan. Sehubungan dengan hal tersebut menurut Pujiharto ada dua kemungkinan yang bakal diakibatkannya:¹² perpecahan dan persatuan.

Kemungkinan *pertama* akan muncul bila nasionalisme ditafsirkan sebagai proyek bersama yang dilakukan oleh orang-orang yang mendukung state bersangkutan secara bersama pula sudah tidak bisa dilakukan secara bersama lagi. Pilihan untuk memisahkan diri itu bisa disebabkan oleh berbagai hal. misalnya pengalaman masa lalu yang buruk dianggap telah menjadikan kehidupan diantara anggota masyarakat tidak menjadi lebih baik. Dengan adanya pengalaman

tersebut, mereka kemudian membayangkan akan merasa lebih nyaman bila bisa menentukan nasibnya sendiri.

Kemungkinan *kedua* akan muncul bila masyarakat pendukung state bersangkutan merasa bahwa diantara mereka perlu membentuk ikatan demi terlaksananya proyek bersama secara bersama pula demi menuju keadaan yang lebih baik lagi. Kekeliruan dimasa lalu dipahami sebagai kekeliruan yang dilakukan secara bersama dan dilihat sebagai pelajaran yang sangat berharga. Dalam kerangka pemahaman seperti itu state dipahami sebagai wahana untuk mengembangkan warga masyarakat secara bersama-sama dalam rangka menuju ke keadaan yang lebih baik.

c. Demokrasi di Indonesia

Tidak dapat disangkal bahwa Indonesia juga melaksanakan demokratisasi. Pembangunan politik yang dijalankan oleh Orde Baru misalnya adalah pembangunan yang demokratis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. meskipun berbeda dengan demokrasi di barat, demokrasi yang didirikan di Indonesia juga menganut prinsip-prinsip dasar dari demokrasi yakni kebebasan/persamaan, kedaulatan rakyat dan prosedur atau tata cara demokratis. Juga tidak dapat disangkal bahwa Pancasila dan UUD 1945 mengandung nilai-nilai demokrasi sehingga kedua perangkat politik tersebut bisa memberikan suasana yang kondusif bagi demokratisasi di Indonesia.

Kebebasan dan persamaan menjadi salah satu hal yang diatur dalam UUD 1945. pasal 28 UUD 1945 menyebutkan kebebasan

... .. kebebasan mendapat secara lisan dan

tulisan.¹³ Kebebasan-kebebasan yang disebutkan oleh UUD 1945 adalah jenis kebebasan yang paling penting dalam demokrasi. Apabila ketiga jenis kebebasan tersebut terwujud dalam dunia nyata, demokrasi di Indonesia telah mempunyai pondasi yang kukuh untuk berkembang. Untuk selanjutnya nilai-nilai demokrasi ini bisa dilihat dalam Pancasila, khususnya sila keempat yang banyak mengupas tentang demokrasi. Misalnya tentang kedaulatan rakyat, permusyawaratan dan perwakilan.

Asas kedaulatan rakyat jelas terlihat di dalam Pancasila dan UUD 1945. *Pertama*, secara eksplisit sila keempat dari Pancasila menyebutkan paham kerakyatan, yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Kalimat tersebut memberikan dasar yang kuat bagi tegaknya demokrasi dan berjalannya demokratisasi di Indonesia, karena nilai-nilai demokrasi juga terlihat di dalamnya.

Dalam pandangan Pancasila kerakyatan dapat diartikan sebagai pentingnya suara-suara rakyat dalam politik, konkritnya peran dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.¹⁴ Konsep tersebut jelas sama dengan konsep kedaulatan rakyat.

Kedua, yang ditunjukkan oleh sila keempat dari Pancasila tersebut ialah perlunya musyawarah dalam pengambilan keputusan politik. Demokrasi menginginkan adanya kebebasan berbicara dan

¹³ Dalam buku *UUD 1945, P-4, GBHN, (untuk bahan mahasiswa baru)*, UGM, 1995, hal 7.

¹⁴ *Demokrasi dan Pembangunan*, UGM, 1995, hal 12.

berkumpul agar aspirasi berbagai pihak dapat disampaikan sehingga dapat diperhatikan oleh pengambil keputusan. Seperti halnya demokrasi, Pancasila menginginkan perbedaan-perbedaan pendapat yang ada di dalam masyarakat sebagaimana tercermin dalam perbedaan-perbedaan antara wakil-wakil rakyat dalam parlemen apa diselesaikan secara musyawarah.

Ketiga, sistem perwakilan ialah ciri ketiga dari demokrasi yang diinginkan oleh Pancasila. Konsekuensinya wakil-wakil rakyat harus dipilih secara demokratis agar mereka senantiasa menghayati aspirasi rakyat dan memperjuangkan di dalam lembaga-lembaga perwakilan. Pancasila mengisyaratkan perlunya pemilu yang bebas dan rahasia agar wakil-wakil rakyat dapat ditentukan dan menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan tuntutan rakyat. Ini merupakan modal dasar atau pondasi dari Pancasila untuk menegakan demokrasi modern di dalam sistem politik Indonesia.

Disamping itu juga bahwa UUD 1945 memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden. Kekuasaan presiden yang memang besar ini sesuai dengan sistem presidensial yang dianut oleh UUD 1945, kemudian diperbesar lagi oleh berbagai ketentuan yang diberikan oleh UUD 1945 dan penjelasannya. Pasal 5 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”¹⁵. Pasal ini menunjukkan besarnya peranan presiden dalam kekuasaan legislatif karena peran Dengan Perwakilan Rakyat lembaga legislatif hanya disebut sebagai pemberi persetujuan. Kekuasaan legislatif presiden diperbesar oleh pasal 22 ayat 1 yang mengatakan bahwa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Namun perlu dicatat di sini bahwa pasal 21 ayat 1 memberikan kekuasaan yang penting bagi lembaga Perwakilan Rakyat untuk memajukan rancangan undang-undang.

Namun dokumen negara tersebut juga menyatakan bahwa kekuasaan presiden adalah “tidak tak terbatas” yang berarti walaupun kekuasaan presiden sangat besar namun mempunyai batas-batas. UUD 1945 menciptakan mekanisme pengawasan terhadap presiden sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa “kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”¹⁶. MPR ialah lembaga negara tertinggi dan presiden adalah pemegang kekuasaan negara tertinggi di bawah MPR yang mengangkat presiden dan wakil presiden. Dalam menjalankan tugas-tugasnya presiden sesuai dengan GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Oleh karena itu presiden bertanggung jawab kepada MPR. Bila MPR menganggap pertanggungjawaban itu tidak

.....

2. Partai Politik

a. Pengertian Partai Politik

Teori partai politik itu sendiri adalah suatu kelompok yang terorganisir anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Kelompok ini berusaha untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.¹⁷

1) Menurut Mark N. Hagopian

Suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam rangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.¹⁸

2) Menurut Carl J. Fridrich

Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan pengawasan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan pengawasan ini memberikan kepada anggota partainya kemamfaatan yang bersifat ideal maupun material.¹⁹

3) Menurut RH. Soltou

Partai Politik adalah organisasi dengan mana orang atau golongan berusaha untuk memperoleh serta menggunakan kekuatan.²⁰

4) Menurut Raymond Girfield Gettel

¹⁷ *Ibid.*

Dalam political science, partai politik terdiri dari sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memakai kekuasaan memilih bertujuan mengawasi pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.²¹

5) Menurut George B. De Huszan dan Thomas H. Stevenson

Partai Politik adalah sekelompok orang yang terorganisir untuk ikut serta mengendalikan pemerintahan, agar dapat melaksanakan programnya dan menempatkan anggotanya dalam jabatan.²²

6) Menurut Burke

Partai Politik adalah kumpulan orang-orang yang mempromosikan usaha-usaha mereka bersama yang diletakkan atas sejumlah prinsip-prinsip khusus yang disetujui.

7) Menurut Geovanni Sartori

Partai Politik adalah semua kelompok politik yang mempunyai identifikasi tertentu berdasarkan label-label tertentu yang ikut dalam pemilu dan memiliki kemampuan untuk menempatkan kandidat-kandidat baik dalam jabatan politik melalui pemilu yang bebas maupun tidak bebas.

Partai Politik adalah semua kelompok yang terorganisir meskipun kadang-kadang terlalu longgar dan berusaha untuk memenangkan

8) Menurut Leon D. Epstein

pemilu serta menempatkan wakil-wakilnya dalam jabatan pemerintahan.

Partai politik juga merupakan salah satu prasyarat bagi negara bangsa yang merdeka dan berdaulat. Tidak saja sebagai salah satu sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat kepada pemerintahan negaranya, partai politik sekaligus juga ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan negara, melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam berbagai lembaga negara yang ada.

Tiga teori yang melihat asal-usul partai politik²³ *pertama*, kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. *Kedua*, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan secara luas. *Ketiga*, pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi.

Meskipun pada awalnya partai sebagai gejala politik modern, lahir di Eropa barat yang kini tumbuh berkembang sebagai gejala politik yang telah mendunia. Hampir tidak satu pun negara di dunia ini yang tidak “memiliki” partai politik.

Teori yang pertama mengatakan partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif (dan eksekutif) karena ada kebutuhan para anggota parlemen (yang ditentukan berdasarkan pengangkatan) untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat.

²³ = ...

Setelah partai politik terbentuk dan menjalankan fungsi, kemudian muncul partai lain yang dibentuk oleh kalangan masyarakat. Partai politik yang terakhir ini biasanya di bentuk oleh kelompok kecil pemimpin masyarakat yang sadar politik berdasarkan penilaian bahwa partai politik yang di bentuk pemerintah tidak mampu menampung dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Teori kedua menjelaskan krisis situasi histories terjadi manakala suatu sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern yang berstruktur kompleks. Pada situasi terjadi berbagai perubahan, seperti penambahan penduduk karena perbaikan fasilitas kesehatan, perluasan pendidikan, mobilitas okupasi, perubahan pola pertanian dan industri, peningkatan aspirasi dan harapan-harapan baru, dan munculnya gerakan-gerakan populis. Perubahan-perubahan itu menimbulkan tiga macam krisis, yakni : *legitimasi*, *integrasi*, dan *partisipasi*. Artinya, perubahan-perubahan mengakibatkan masyarakat mempertanyakan prinsip-prinsip yang mendasari legitimasi kewenangan pihak yang memerintah; menimbulkan masalah dalam identitas yang menyatukan masyarakat sebagai suatu bangsa; dan mengakibatkan timbulnya tuntutan yang semakin besar untuk ikut serta dalam proses politik. Untuk mengatasi tiga permasalahan inilah partai politik di bentuk. Partai politik yang berakar kuat dalam masyarakat diharapkan dapat mengendalikan pemerintahan sehingga terbentuk semacam pola hubungan

Teori ketiga melihat modernisasi sosial ekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, perluasan kekuasaan negara, seperti birokratisasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan organisasi profesi, dan peningkatan kemampuan individu yang mempengaruhi lingkungan melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut. Jadi, *partai politik merupakan produk logis dari modernisasi sosial ekonomi*. Dengan demikian teori ketiga memiliki kesamaan dengan teori kedua bahwa partai politik berkaitan dengan perubahan yang ditimbulkan modernisasi. *Perbedaan kedua teori ini terletak pada proses pembentukannya*. Teori kedua mengatakan perubahan menimbulkan tiga krisis dan partai politik dibentuk untuk mengatasi krisis, sedangkan teori ketiga menyatakan perubahan-perubahan itulah yang melahirkan kebutuhan adanya partai politik.

Partai politik lahir karena semakin meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan kekuatan yang perlu diperhitungkan serta diikuti sertakan dalam proses politik.²⁴

Partai politik lahir bisa dari dalam parlemen (intra parlemen) atau dari luar parlemen (ekstra parlemen)²⁵ meskipun dijelaskan oleh Maurice duverger dalam tulisannya yang di edit oleh Ichlasul Amal “Asal Mula Partai Politik” bahwa perbedaan antara partai politik yang terbentuk di

²⁴ Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1986 hal. 159.

²⁵ *Ibid*, hal. 160 Bisa dilihat pula dalam Maurice, Asal Mula Partai Politik dalam Ichlasul Amal, ... hal. 2 dan hal. 8

dalam parlemen dan yang terbentuk diluar parlemen adalah *tidak jelas*; hal itu lebih merupakan kecenderungan umum dari pada tipe yang terdiferensiasi dan biasanya amat sulit diterapkan dalam praktek,²⁶ namun pada bagian lain dalam tulisan yang sama ia mengemukakan perbedaannya. Menurut Duverger²⁷, setidaknya ada lima perbedaan antara dua ‘tipe’ partai tersebut. Kelima perbedaan tersebut meliputi : *Pertama*, tingkat desentralisasi sebuah partai, *kedua*, partai ekstra parlemen lebih dahulu mempunyai organisasi, baru kemudian mempersatukan jaringan sel-sel mereka dalam satu wadah, *ketiga*, dalam partai ekstra parlemen campur tangan parlemen tidak terjadi terutama dalam awal pembentukannya, *keempat*, partai semacam ini cenderung lebih independen dan melihat pemilu dan kursi di parlemen hanya sebagai satu dari sekian banyak sarana untuk mencapai tujuannya, sementara partai yang timbul dari dalam parlemen melihatnya sebagai sesuatu yang sangat penting, *kelima*, dengan memperhatikan sejumlah karakter diatas, partai yang muncul dari luar parlemen terkesan lebih modern dari pada partai intra parlemen yang lebih terlekat oleh kebalikan dari sejumlah karakter diatas.

Selayaknyalah sebuah struktur dalam sistem politik, partai politik memiliki sejumlah fungsi politik. Fungsi-fungsi tersebut meliputi : fungsi representasi, konversi, agregasi, integrasi (partisipasi, sosialisasi, mobilisasi), persuasi, represi, rekrutmen (pengkatan tenaga-tenaga baru)

²⁶ Disarikan dari ulasan Maurice Duverger dalam Asal Mula Partai Politik, Ichlasul Amal.

²⁷ Ibid., hal. 100-101.

pemimpin, pertimbangan-pertimbangan, perumusan kebijakan serta kontrol terhadap pemerintah.²⁸

Jika diperhatikan perkembangan berbagai partai politik diberbagai sistem politik, ternyata tidaklah selalu sama antara partai politik tersebut. Ada partai politik yang dalam keanggotannya sangat tertutup, sebaliknya ada yang sangat terbuka, maka tipologi partai sangatlah membantu.

Berdasarkan konsep tipologi ini partai politik diklasifikasikan berdasar Kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain : asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, serta basis sosial dan tujuan. Berdasarkan Kriteria pertama yakni asas dan orientasi, partai politik disebabkan kedalam :

a. Partai Pragmatis

Partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat pada suatu doktrin dan ideologi tertentu.

b. Partai doktriner

Partai yang segala program dan kegiatan kongkretnya didasarkan pada ideologi tertentu.

Sementara apabila dilihat dari komposisi dan fungsi anggota partai politik bisa digolongkan ke dalam :

1) Partai Proto

Bentuk awal dari partai politik yang bersifat sebagai pengelompok politis/fraksi dalam masyarakat yang dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologi dalam masyarakat.

²⁸ Roy C. Macridis, Pengantar Sejarah, Fungsi dan Tripologi Partai-partai dalam Ichlasul Amal, Teori-teori Mutakhir ... hal. 27. Partai politik dalam Moctor Mas, Oed dan Sollin Mac Andrews (ed. 5) perbandingan system politik, Gama Press, Yogyakarta, 1984.

2) Partai Diktatorial

Sub tipe partai massa sebagian tetapi memiliki ciri ideologi kaku dan radikal, dimana pemimpin tertinggi partai melakukan kontrol yang ketat terhadap rekrutmen pengurus bawahan/anggota partai.

3) Partai Catch-All

Gabungan dari partai massa dan partai kader dan cirinya tidak memandang kelas sosial dalam masyarakat yang penting pendukung banyak.

4) Partai Massa

Yaitu partai politik yang mengandalkan keunggulannya pada jumlah massa.

5) Partai Kader

Yaitu partai yang mengandalkan pada kualitas anggota, keketatan organisasi dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama.

Ciri keanggotaan terbatas tingkat organisasi dan ideologi sentral, perluasan hak pilih terjadi setelah perang dunia kedua. Sedangkan dilihat dari basis sosialnya, partai digolongkan kedalam :

- a) Partai politik yang beranggotakan lapisan sosial dalam masyarakat seperti, kelas atas, kelas menengah dan bawah,
- b) Partai politik yang beranggotakan kelompok kepentingan tertentu seperti petani, buruh dan pengusaha,
- c) Partai politik yang hanya didasarkan atau agama tertentu, seperti

Islam, Katholik, Kristen dan sebagainya

d) Partai politik yang didasarkan pada budaya tertentu.

Terakhir tipologi partai didasarkan atas tujuannya. Dilihat dari tujuannya, maka partai dikelompokkan menjadi :

- Partai Perwakilan : partai yang menghimpun berbagai kelompok masyarakat untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi di parlemen.
- Partai Pembina Bangsa : partai yang bertujuan menciptakan kesatuan nasional dan biasanya menindas kepentingan sempit.
- Partai Mobilisasi : partai yang berupaya memobilisasi masyarakat kearah pencapaian tujuan partai yang ditetapkan oleh pimpinan partai. Partai ini cenderung monopolistis karena dalam masyarakat hanya terdapat satu partai.²⁹

Dengan sedikit perbedaan, Roy C. Macridis³⁰ mengklasifikasikan partai politik berdasarkan kriteria-kriteria : *pertama*, sumber dukungan partai yang menghasilkan partai komprehensif dan partai sektarian, *kedua*, organisasi internal yang melahirkan partai bersifat tertutup dan terbuka dan

²⁹ Ramlan Surbakti, *Op. Cit.* ... hal. 121.

³⁰ Roy C. Macridis, *Demokrasi dan Tipe-tipe Partai-partai dalam Kehidupan Umum*

terakhir, cara-cara bertindak dan fungsi. Dua tipe yang lahir dari kriteria ini adalah partai dengan tipe *diffused* dan *specialized*.

Berkaitan dengan partai politik adalah sistem kepartaian. Artinya diakuinya partai politik dalam sebuah sistem politik sebagai satu dari sekian struktur didalam sistem tersebut pada saat itu pula lahirlah sistem kepartaian sebagai sub-sistem dari sistem politik tersebut.

Dalam membahas sistem kepartaian tidak jarang atau hampir selalu seseorang terjebak dalam tinjauan yang hanya didasarkan atas tipologi numerik (*numerical typology*), dimana melalui tinjauan ini sistem kepartaian diklasifikasikan menjadi sistem satu partai, sistem dwi partai dan sistem multi partai.³¹ Cara pandang sistem kepartaian seperti ini bukannya tidak bermanfaat, hanya saja ini terlalu bersifat tradisional yang tidak “sanggup” melihat interaksi yang terjadi diantara partai-partai yang ada.

Risdhawanda Imawan³² mengemukakan bahwa sistem kepartaian terbentuk dari (adanya) jumlah partai, interaksi dan kompetisi antara partai-partai tersebut. Dan apabila dilihat sistem kepartaian dari sisi integrasinya yang didasarkan atas jarak (ideologi) politik, Giovanni Sartori³³ menyatakan bahwa penggolongan sistem kepartaian bukanlah masalah partai, melainkan jarak ideologi diantara partai-partai yang ada. Dalam hal ini penggolongan sistem kepartaian didasarkan atas jumlah kutub (polar), jarak diantara kutub-kutub tersebut (polaritas) dan arah

³¹ *Op. Cit.* ... hal. 129 Mengutip Pendapat Maurice Duverger. Selain itu hampir semua literature ilmu politik mengulas system kepartaian dengan cara ini, numerical typology.

³² Riswanda Imawan, *Isu-isu Politik Dekade 1990-an dan Pengaruhnya terhadap System Kepartaian di Indonesia*, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol, UGM, 1991, hal. 2.

³³ Giovanni Sartori, *Presidentialism and Democracy in Developing Countries*, *Op. Cit.* hal. 127-128.

perilaku politiknya. Oleh karena itu Sartori mengklasifikasikan sistem kepartaian menjadi : sistem dengan *Pluralisme sederhana*, *pluralisme moderat* dan *pluralisme ekstrim*. Ramlan Surbakti secara skematik melukiskan klasifikasi sistem kepartaian *Sartori* ini sebagai berikut :³⁴

Sistem Kepartaian	Kutub	Polaritas	Arah
Pluralisme Sederhana	Bipolar	Tidak ada	Sentripetal
Pluralisme Moderat	Bipolar	Kecil	Sentripetal
Pluralisme Ekstrim	Multi Polar	Besar	Sentrifugal

Sedangkan yang dimaksud dengan *bipolar* ialah kegiatan aktual suatu sistem partai yang bertumpu pada dua kutub, meskipun jumlah partai lebih dari dua karena sistem kepartaian ini tidak memiliki perbedaan ideologi yang tajam. Sedangkan yang dimaksud dengan *multipolar* ialah sistem partai yang bertumpu pada lebih dari dua kutub yang biasanya terdiri atas lebih dari dua partai dan diantara kutub-kutub itu terdapat perbedaan ideologi yang tajam. Namun, yang terpenting tidak hanya jumlah kutub, tetapi juga jarak antara kutub-kutub tersebut. Yang dimaksud dengan polarisasi yang besar ialah jarak ideologi diantara kutub-kutub sangat jauh, misalnya : yang satu berideologi kiri (komunisme), yang lain berideologi kanan (kapitalisme). Dengan kata lain, perbedaan ideologi diantara partai-partai sangat tajam. Polarisasi yang sangat besar ini merupakan indikator yang menunjukkan ketiadaan konsensus dasar mengenai asas dan tujuan masyarakat negara yang hendak dituju.

Akan tetapi hal ini tidak harus ditafsirkan sebagai perpecahan yang

... hal itu mungkin merupakan gejala sementara

yang masih dapat diatasi. Sehingga perlu diperhatikan arah perilaku politik setiap partai apakah menuju kepusat atau keintegrasi nasional (*sentripetal*) ataukah menjauhi pusat atau hendak mengembangkan sistem tersendiri (*sentrifugal*).

Apabila kecenderungan arah perilaku partai menjauhi pusat maka gejala ini disebut sebagai proses radikalisasi yang akan berakibat perpecahan yang tak teratasi. Sebaliknya, apabila kecenderungan arah perilaku partai mendekati pusat (integrasi nasional) maka gejala ini disebut depolarisasi yang pada gilirannya akan mencapai suatu konsensus dasar. Sistem bipolar cenderung bersifat sentrifugal. Dalam konteks negara-negara berkembang, beberapa sistem kepartaian yaitu pluralisme ekstrim dan hegemoni. Sistem kepartaian pluralisme ekstrim (*polarized pluralism*) biasanya terbentuk dalam masyarakat yang secara sosio-kultural sangat majemuk. Jumlah partai dalam sistem ini sangat banyak (lima atau lebih) yang masing-masing memiliki ideologi yang bertentangan sehingga sukar sekali mencapai konsensus. Kemungkinan untuk memerintah bergantung pada kemampuannya menyusun koalisi. Karena memiliki tingkat konsensus yang rendah maka setiap koalisi yang memerintah selalu diancam krisis manakala menghadapi pengambilan keputusan dalam soal yang menyangkut ideologi dan kepentingan pendukung. Sehingga sistem kepartaian ini cenderung menghasilkan ketidak stabilan politik.

Kegagalan sistem kepartaian pluralisme ekstrim melahirkan suatu situasi akan pentingnya kekuatan yang tidak hanya menciptakan ketertiban, tetapi juga memobilisasi masyarakat kearah modernisasi sosial ekonomi. Pihak militer merupakan yang sering tampil untuk melakukan

Kelainan. Kelemahan militer cenderung mempunyai jumlah partai dan

menciptakan suatu partai hegemoni.³⁵ Dalam sistem partai hegemoni, sejumlah partai diizinkan berkompetisi secara bebas dengan partai hegemoni.

Apa yang dikemukakan oleh Sartori bahwa sistem kepartaian tumbuh, berkembang secara linier dari *Atomized, Polarized Pluralisme, Two-party, Pre-dominant-Partai, Hegemonic-Party hingga Single-Partay* merupakan pemahaman sistem kepartaian dari aspek dinamikanya. Berdasarkan perkembangan tersebut, Riswanda Imawan menyimpulkan bahwa sistem kepartaian bukan merupakan produk tetap, yang tidak berubah. Sistem itu berubah menurut faktor-faktor internal ataupun eksternal yang mempengaruhi.³⁶

Sementara itu Daniel Dakhidae³⁷ menunjukkan sejumlah hal yang harus diteliti bilamana ingin memberikan gambaran yang komprehensif tentang sistem kepartaian. Sejumlah hal tersebut meliputi : *Pertama*, jumlah unit yang berinteraksi merupakan bidang yang sampai sekarang paling banyak dipersoalkan. Berkaitan dengan ini sering disimpulkan bahwa suatu bangsa yang ingin merumuskan *nation building* adalah bangsa yang (hanya) membutuhkan satu partai politik. *Kedua*, distribusi kekuatan antar partai. Secara kuantitatif, distribusi kekuatan ini diketahui

³⁵ Sartori membagi sistem partai ini menjadi dua tipe, yaitu sistem hegemoni yang bersifat ideologis dan sistem hegemoni yang bersifat pragmatis. Dalam sistem yang bersifat ideologis, partai-partai satelit terwakili dalam pemerintahan tetapi tanpa hak-hak yang penuh. Sedangkan yang bersifat pragmatis, partai-partai marginal memiliki hak penuh untuk berpartisipasi dalam proses politik. Negara-negara berkembang biasanya mulai dengan sistem kepartaian pluralisme ekstrim, kemudian beralih pada sistem kepartaian yang hegemoni. Kelemahannya terletak pada dasar eksplanasi yang kurang tajam khususnya dalam menjelaskan gejala ketidakstabilan. Klasifikasi sistem kepartaian di atas dikutip Riswanda Imawan, dalam isu-isu politik ... hal 3 yang ia kutip dari Giovanni Sartori, *Parties and Party System*, New York, Cambridge University Press, 1976.

³⁶ Riswanda Imawan, *Isu-isu Politik ...* hal. 203.

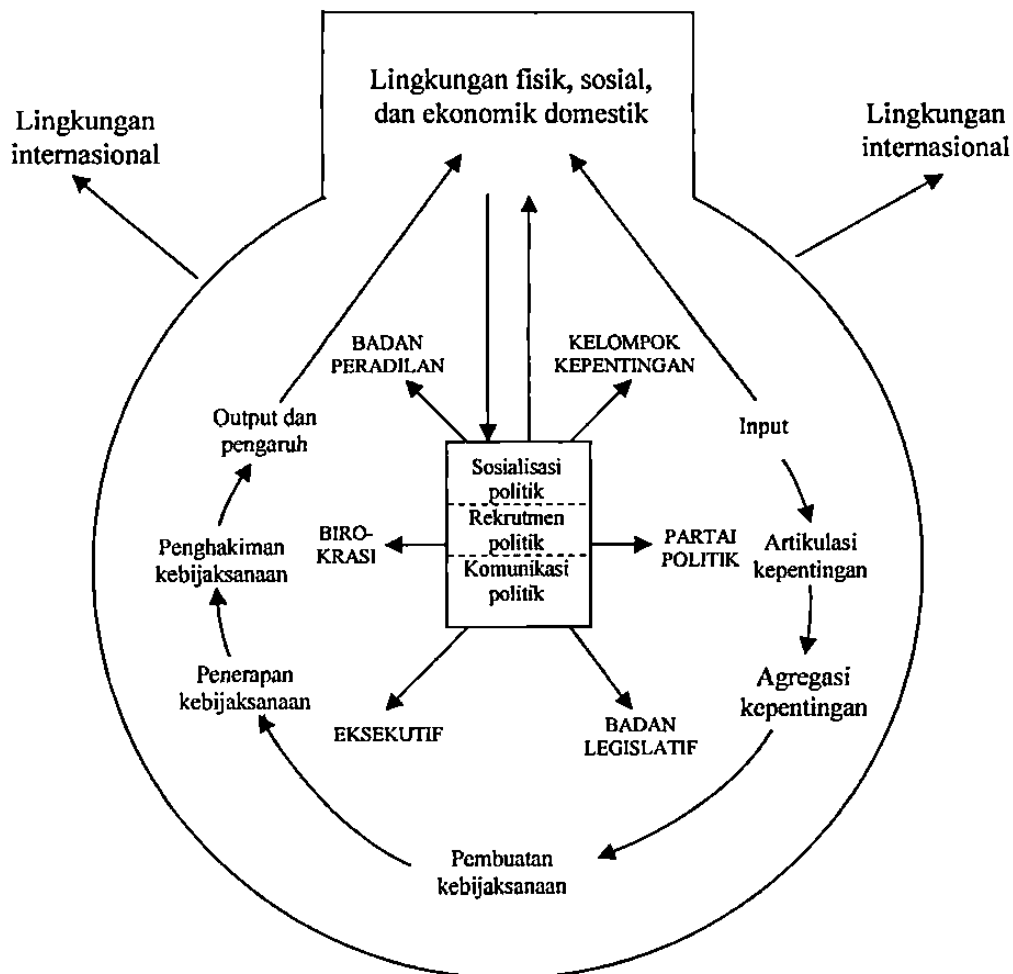
³⁷ Daniel Dakhidae, *Partai Politik dan System Kepartaian di Indonesia dalam Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, (Seri Prisma), LP3ES, 1991, hal. 193.

melalui pemilihan umum atau dalam jumlah perwakilan yang dimenangkan sebagai kelanjutan pemilihan. Dari sini kemudian timbul sebutan partai minoritas atau mayoritas. Namun demikian, tolok ukur kuantitatif semacam ini bukan satu-satunya yang menentukan. Distribusi kekuatan ini juga memperhatikan peranan aktual atau potensial dari partai didalam pemerintahan dan didalam oposisi. *Ketiga*, integrasi sistem kepartaian. Suatu hal yang berkaitan erat dengan integrasi sistem kepartaian ini adalah jarak (ideologi) politik masing-masing partai. Hipotesa dasar yang sering dikemukakan dalam hal ini adalah “suatu sistem kepartaian dikatakan berintegrasi bilamana tingkat permusuhan antar partai berada dalam tingkatan terendah”. *Keempat*, memperhatikan sistem kepartaian dari sisi dinamika ini, berbeda dengan tiga aspek sebelumnya, melukiskan perubahan sistem kepartaian dan dalam jangkauan yang lebih luas proses perubahan politik itu sendiri. Dengan kata lain, aspek dinamika ini menyoroti perubahan dan pergeseran dan dampak politik dari perubahan-perubahan yang terjadi pada tiga hal (aspek) di atas jumlah partai, distribusi kekuatan partai secara keseluruhan.

Di dalam literature-literatur ilmu politik, partai politik mempunyai posisi yang strategis dan deterministik bagi upaya pembuatan *public policy*. Bahkan lebih jauh lagi partai politik sering dianalogikan sebagai mesin konversi untuk mengolah stimulan yang tersebar pada level masyarakat sehingga eksistensi partai politik sangat menentukan bekerjanya sistem politik secara maksimal. Dalam masyarakat modern yang permasalahan dan kebutuhannya semakin kompleks, tentu saja

mengartikulasikan kepentingan yang bervariasi tersebut, karena sangatlah sulit untuk membahas persoalan bersama-sama dalam suatu forum pada satu waktu seperti pada masa Yunani Kuno. Oleh karena itu untuk menjamin pelaksanaan partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam politik dan pemerintahan ini diwujudkanlah partai politik sebagai mesin yang melaksanakan proses pengolahan sikap, pandangan dan keinginan dari masyarakat. Pentingnya peranan dan posisi partai politik ini digambarkan oleh Almond dalam sebuah diagram yang mendeskripsikan struktur, fungsi, alur dan cara kerja dari sistem politik secara komprehensif dengan tetap berpegang pada fungsi-fungsi utama struktur politik yaitu sosialisasi politik, komunikasi politik dan rekrutmen.³⁸

³⁸ Mochtar Mas'ood dan Collin Mc. Andrew, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, hal. 30.



Dalam gambar tersebut, kelompok kepentingan, badan legislatif, eksekutif, birokrasi, badan peradilan partai politik merupakan bagian dari sistem politik. Ditengah gambar terdapat tiga fungsi politik yang mempengaruhi pembuatan kebijakan. Fungsi tersebut yaitu :

- a. Sosialisasi politik, merupakan fungsi pengembangan dan memperkuat sikap politik masyarakat yang dimaksudkan untuk menjalankan peranan-peranan politik, administratif dan yudisial tertentu.
- b. Rekrutmen politik (*political recruitment*), merupakan mekanisme

... untuk mengisi jabatan

- c. Komunikasi politik yang merupakan saluran bagi mengalirnya informasi melalui masyarakat maupun berbagai struktur yang ada dalam sistem politik.

Partai politik yang terorganisir baru muncul pada akhir abad ke-18 dan abad ke-19 di Eropa Barat yang dimaksudkan untuk mempermudah usaha dari luar kelompok lingkungan kekuasaan politik untuk berkompetisi memperebutkan jabatan dalam pemerintahan. Kondisi ini semakin memuncak saat desakan kelas menengah dan kaum buruh mulai menguat sehingga kelas atas dan kaum birokrat terpaksa harus mencari dukungan publik dalam rangka mempertahankan jabatan dan pengaruh mereka. Pada kondisi ini partai politik memainkan peran yang sangat penting sebagai wadah kompetisi yang mempertemukan kekuatan antara kelas penguasa dengan yang dikuasai secara terbuka. Saat ini lebih dari tiga perempat bangsa-bangsa merdeka memiliki satu atau lebih partai politik. Pada akhir tahun 1960-an hanya 31 negara yang mempunyai partai politik. Negara-negara itu umumnya berada di Timur Tengah, Asia Selatan dan Tenggara serta Afrika dikarenakan masih kuatnya penguasaan dinasti tradisional seperti negara-negara kecil di Teluk Persia, Ethiopia dan negara-negara yang dikuasai rezim militer seperti Yunani dan Thailand.

1) Fungsi Partai Politik

Sebagai wadah yang sangat kental dengan nuansa politik, tentunya partai politik mempunyai segudang tugas sekaligus fungsi

sekali interpretasi dan daftar pemikiran dari ilmuwan politik yang berkaitan dengan fungsi partai politik, namun secara umum fungsi partai politik antara lain :

1) Representasi (perwakilan)

Kegiatan representasi dimaksudkan sebagai upaya mengartikulasikan kepentingan didalam dan melalui partai. Fungsi ini juga berwujud sebagai perantara yang merupakan ekspresi kepentingan kelompok yang diwakilinya misalnya gereja, buruh, petani dan sebagainya lewat kompromi atas kepentingan dan pendapat yang berbeda sehingga dapat diterima semua anggota.

2) Konversi dan agresi

Proses konversi menyangkut proses transformasi dari kepentingan dan tuntutan untuk menjadi kebijaksanaan dan keputusan.

3) Intergrasi (partisipasi, sosialisasi dan mobilisasi)

Integrasi merupakan kata utama dari varian fungsi-fungsi partai politik yaitu partisipasi, sosialisasi dan mobilisasi. Sosialisasi menyangkut proses transfer norma-norma sistem politik kepada masyarakat, mobilisasi merupakan variasi ekstrim dari sosialisasi berupa menanamkan kepentingan kepada sejumlah orang untuk menjamin terciptanya dukungan massa kepada partai politik maupun sistem politik secara keseluruhan. Sedangkan partisipasi sendiri merupakan hasil dari mobilisasi dan sosialisasi. Massa diarahkan pada keyakinan bahwa partai merupakan medium

kebijakan terbuka bagi semua pihak sehingga mampu mengintegrasikan individu ke dalam sistem politik.

4) Rekrutmen

Merupakan kegiatan partai yang berkaitan dengan persiapan untuk mencari dan melatih pemimpin dalam pemilihan untuk mengisi jabatan dalam pemerintahan.

5) Pertimbangan, perumusan kebijakan dan kontrol terhadap pemerintah. Partai politik memungkinkan terciptanya suasana perdebatan tujuan dan strategi yang dibuat oleh pemerintah lewat diskusi dan kompetisi antara pendapat-pendapat yang ada sehingga ada kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan publik, partai politik akan menuntut proses pertimbangan kembali yang lebih terbuka untuk semua pihak.

6) Sarana untuk mengatur konflik

Tugas lain dari partai politik yaitu membantu merumuskan akar-akar pertikaian dan berusaha mengatasi konflik tersebut dengan mencari jalan tengah dari pendapat dan kepentingan yang berbeda.

2) Tugas-tugas Partai Politik

Adapun tugas-tugas partai politik adalah sebagai berikut :

1) Menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah. Partai politik disini bertugas untuk menampung semua pendapat dan keinginan rakyat atau khalayak ramai kemudian langkah selanjutnya ialah

pemerintah untuk dapat dijadikan politik yang akan diperjuangkan semaksimal mungkin.

- 2) Partai politik juga mempunyai tugas untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan atau ide-ide yang tersimpul didalam rencana kebijaksanaan pemerintah.
- 3) Partai politik juga mempunyai tugas mendidik para warga negara menjadi orang yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial.
- 4) Partai politik mempunyai tugas untuk menumbuhkan dan memupuk kesadaran akan loyalitas nasional.
- 5) Partai politik bertugas mencari dan mengajak ikut serta mereka yang kelihatan dan dianggap berbakat dan mampu ikut serta dan relatif dalam lapangan kegiatan politik dan mendidik mereka untuk menjadi kader pemimpin.
- 6) Partai politik juga bertugas untuk mengatur pertikaian dan membantu merumuskan konflik-konflik dan selanjutnya berusaha untuk mengatasi konflik tersebut serta mencari penyelesaiannya.³⁹

Ada dua fungsi utama partai politik pada dasarnya :

- 1) Mengumpulkan, mengorganisasi, dan merumuskan aspirasi rakyat untuk diperhatikan oleh sistem politik.
- 2) Menempatkan wakil-wakil yang dianggap cakap untuk mewujudkan aspirasi rakyat.⁴⁰

³⁹ Soelistyati Ismail Gani, *Op. Cit.*, hal. 113.

Dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu :

1) Partai politik sebagai sarana komunikasi politik

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.

2) Partai sebagai sarana sosialisasi politik

Partai politik juga main peranan sebagai sarana sosialisasi politik yang berarti proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang biasanya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada.

3) Partai sebagai sarana rekrutmen politik

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan partai sebagai anggota partai.

4) Partai sebagai sarana pengatur konflik

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar, jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya.⁴¹

5. Klasifikasi Partai Politik

Klasifikasi partai dapat dilakukan dengan berbagai cara⁴² bila

.....

umum dapat dibagi dalam dua jenis yaitu :

a) Partai Massa

Partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota, oleh karena itu ia biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat untuk bernaung dibawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak kabur.

b) Partai Kader

Partai kader mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan.

Klasifikasi partai politik lainnya dapat dilakukan dari segi sifat dan orientasi, dalam klasifikasi ini partai politik dapat dibagi dua jenis yaitu :

1) Partai Lindungan

Partai lindungan umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor, disiplin yang lemah dan biasanya tidak mementingkan pemungutan iuran secara teratur. Maksud utamanya adalah

2) Partai Ideologi

Biasanya mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat. Terhadap calon anggotanya diadakan saringan, sedangkan untuk menjadi anggota pimpinan disyaratkan lulus melalui beberapa macam percobaan.

Klasifikasi partai politik menurut *Maurice Durverger* dalam bukunya *Political Parties*, ada tiga yaitu :⁴³

1) Sistem Partai Tunggal

Sistem satu partai memang benar-benar hanya mempunyai satu partai dalam negara, maupun untuk partai yang mempunyai kedudukan dominan diantara beberapa partai lainnya.

2) Sistem Dwi Partai

Adanya dua partai atau beberapa partai, tetapi dengan peranan dominan dari dua partai.

3) Sistem Multi Partai

Terdapat beberapa partai yang hampir sama kekuatannya, dimana masing-masing partai mempertahankan sikap politiknya tentang suatu masalah penting. Pola multi partai biasanya mencerminkan

.....

Partai adalah tempat sekelompok orang yang memiliki ideologi dan tujuan yang sama berkumpul untuk mewujudkan keinginannya. Sehingga partai bisa juga disebut sebagai sebuah organisasi.

Menurut Maurice Duverger yang membedakan partai dengan organisasi⁴⁴ lain adalah sebagai berikut :

1) Organisasi yang horizontal

Dapat dibedakan menjadi :

a) Direct Parties (Partai Langsung)

Dalam partai langsung ini anggotanya adalah perorangan atau individu-individu.

b) Indirect Parties (Tidak Langsung)

Anggota partai ini adalah kolektif sebagai suatu keseluruhan, jadi partai tidak langsung tidak mempunyai anggota orang atau individu akan tetapi menghimpun satuan organisasi yang sudah ada.

2) Organisasi yang Vertikal

Satuan dasar dari susunan ini merupakan elemen dasar. Ada 4 macam elemen dasarnya yakni :

a) Caucus

Merupakan satuan yang tertutup dan organisasinya tidak permanen, orang yang masuk dalam caucus diharapkan dapat memenangkan pemilihan karena untuk masuk kedalamnya

⁴⁴ Maurice Duverger, *Political Parties: Their Organization and Activity in The Modern state*,

melalui seleksi oleh anggota yang telah ada, maka untuk caucus terletak pada kualitas anggotanya.

Caucus dapat dibedakan menjadi 2 yakni :

- (1) Caucus langsung yang anggotanya kaum middle class.
- (2) Caucus tidak langsung yang beranggota yang menunjuk oleh kolektif anggota partai.

b) Branch

Merupakan kebalikan dari caucus, satuannya terbuka dan berusaha selalu untuk menambah anggotanya dan mempunyai organisasi dan administrasi yang permanen.

c) Cell

Cell adalah merupakan satuan dasar dari satu partai, perbedaan antar cell dan branch yang terpenting yaitu terletak pada kelompok yang jumlah anggotanya.

d) Militan

Suatu laskar yang diorganisasikan secara hirarkis seperti didalam ketentaraan, terdapat pembagian kelompok secara regu, batalyon, dan sebagainya.⁴⁵

Beberapa cara untuk membedakan partai politik dengan organisasi lainnya adalah : *Satu*, partai politik akan ikut serta dalam pemilu. *Dua*, partai politik akan menempatkan wakil-wakilnya dalam jabatan publik melalui proses pemilu.⁴⁶

⁴⁵ Dalam Maurice Duveger, *Political Parties : Their Organization and Activity in the Modern State, Pengantar Ilmu Politik*, (Ghalia Indonesia, 1984), hal. 116-119.

⁴⁶ Bambang Eka C., *Op. Cit.*

Partai politik tidak dapat berdiri dengan sendirinya, ada beberapa syarat untuk mengukur bahwa sebuah organisasi itu sudah menjadi partai politik, yaitu : ada hubungan yang relatif erat dan teratur antar pemimpin dan pengikutnya, adanya prosedur yang kontinue untuk memilih kandidat dan pengelola masalah publik, adanya stabilitas pendukung dalam jumlah keleluasaan pendukung, perbedaan berdasarkan perspektif emosional dalam arti tekanan emosional yang membedakan partai dengan yang lain.⁴⁷

Dalam perkembangan partai politik juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Menurut Epstein, faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan partai politik adalah sebagai berikut :⁴⁸

- 1) Adanya perluasan kesempatan yang diberikan pemerintah untuk munculnya kelompok-kelompok baru dengan ideologi atau label yang baru.
- 2) Struktur-struktur sosial yang mengacu pada faktor SARA, agar ada perbedaan antara satu partai dengan yang lain.
- 3) Adanya kesempatan untuk kerja sama antar masing-masing kelompok dalam masyarakat.
- 4) Semakin besar kursi jabatan publik yang mungkin diisi dalam pemilu yang memberi peluang terjadinya konflik yang lebih besar.
- 5) Sistem pemilu proporsional cenderung melahirkan sistem multi partai, biasanya partai menjadi banyak dan kurang baik, ...

distrik cenderung terdapat dua partai, sehingga akses untuk mempengaruhi kebijakan semakin besar.

Partai politik di Indonesia pertama-tama lahir dalam zaman kolonial sebagai manifestasi dari bangkitnya kesadaran nasional. Dalam suasana itu semua organisasi, apakah ia bertujuan sosial atau terang-terangan menganut asas politik agama atau sekuler, memainkan peranan penting dalam berkembangnya pergerakan nasional. Pola kepartaian masa itu menunjukkan keanekaragaman, yang diteruskan dalam masa merdeka dalam bentuk sistem multi partai, yang ditandai dengan banyaknya partai-partai seperti : PNI, Masyumi, PKI, PSI, dan lainnya.⁴⁹

Partai Amanat Nasional (PAN) yang lahir pada masa reformasi hadir sebagai salah satu kekuatan politik untuk menegakkan keadilan dan kedaulatan rakyat yang menjadikan komitmen moral sebagai ciri dari seluruh prilaku individu dan politiknya.

3) Tipologi Partai Politik

Ada banyak definisi dan tipologi partai politik yang sering kita dengar seperti otoriter dan demokrasi, integrative dan representative, ideologis dan pragmatis, agamis dan sekuler dan sebagainya. Tentunya pembentukan tipologi partai ini dimaksudkan untuk mempermudah

mempelajari karakteristik utamanya. Tipologi kepartaian setidaknya didasarkan pada :⁵⁰

1) Sumber dukungan partai

Berdasarkan pada pemahaman ini partai dibedakan menjadi partai komprehensif dan sektarian. Dikatakan komprehensif jika partai berusaha untuk mendapatkan suara dari warga negara, sedangkan partai sektarian adalah partai yang menggunakan kelas, agama, daerah, ideologi sebagai nilai jual partai untuk memperoleh dukungan. Klasifikasi tidak sesuai dengan fakta sepenuhnya seperti partai sosialis religius yang sebenarnya sektarian pada kenyataannya tidak eksklusif dan partai-partai di Inggris dan Amerika yang komprehensif ternyata terlalu sulit untuk memperjuangkan kepentingan semua kelompok. Hal ini menyebabkan mereka kadang-kadang harus mendiskriminasikan pengikut mereka sehingga pada saat dan tingkat tertentu cenderung eksklusif.

2) Organisasi internal

Tipe yang dimaksud adalah bersifat tertutup dan terbuka. Partai tertutup memiliki keanggotaan yang terbatas atau mengenakan kualifikasi yang ketat kepada anggotanya. Sedangkan partai terbuka adalah partai yang membolehkan semua orang menjadi anggotanya. Partai tertutup sering dikaitkan dengan sifat otoriter dan cenderung menekankan aksi yang langsung diarahkan pada

kontrol monopolistik pemerintah sedangkan partai terbuka lebih menekankan pada aksi politik dan menghormati pluralisme.

3) Cara bertindak dan fungsi

Pembedaan partai pada wilayah ini terbagi menjadi menyebar dan memusat. Partai yang menyebar cenderung menekankan integrasi, pengawasan permanen, mobilisasi dan pembangunan institusi sedangkan partai yang terpesialisasi menekankan pada perwakilan, agregasi, pertimbangan dan perumusan kebijakan, partisipasi serta kontrol pemerintah untuk maksud dan periode tertentu.

b. Strategi Partai Politik

Strategi berasal dari bahasa Yunani “Strategos” (Stratos = militer dan og = memimpin), yang berarti “generalship” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam dunia perang.

Strategi selalu memberikan “keuntungan” untuk mencapai tujuan dengan cara tersendiri “trik sendiri”, setidaknya taktik merupakan penjabaran operational dari strategi.

Pengertian strategi menurut para ahli :

1) Kor Van Clauseditz

Strategi adalah suatu seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan suatu perang sedangkan taktik adalah seni menggunakan tentara dalam sebuah pertempuran baik dalam bisnis, politik atau strategi yang lainnya.⁵¹

2) Henry Mintzberg

Strategi merupakan serangkaian tindakan mendasar yang dibuat oleh jajaran organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu seperti visi pokok, analisis, identifikasi alternatif, peluang, analisis kekuatan organisasi dan lain-lain.⁵²

3) Ricky Graffin

Strategi merupakan tulang punggung dari perencanaan dan batas untuk kegiatan operasionalnya hanya saja titik berat dari perencanaan strategi dan taktik yang digunakan.⁵³

Dengan melihat pengertian dari para ahli tersebut maka tentukan dapat ditarik kesimpulan mengenai strategi sebagai contoh analogi adalah mislanya jika anda beranggapan bahwa anda yang terbaik adalah bagaimana memenangkan perang tanpa harus menjalankan operasi peperangan yang memakan waktu lama dan membosankan serta memakan banyak korban, tetapi bagaimana

strategi merupakan suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi yang hendak di raih suatu strategi yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria seperti yang dinyatakan oleh Bryson:⁵⁴

- 1) Strategi secara teknis harus dapat dikerjakan
- 2) Strategi secara politis dapat diterima oleh para key stake holders.
- 3) Strategi harus sesuai dengan filosofi dan nilai-nilai organisasi
- 4) Strategi sebaiknya bersifat etis, koral, legal dan merupakan keinginan organisasi untuk menjadi baik.
- 5) Strategi harus sesuai dengan isu strategi yang hendak dipecahkan.

3. Pemilihan Umum

a. Pengertian Pemilu

Adanya kaitan yang erat antara partai politik dan pemilihan umum disebabkan karena sistem pemilu ditata berdasarkan prinsip demokrasi, yaitu “persamaan kesempatan kepada semua kontestan”, hal ini dapat disimpulkan bahwa sistem pemilihan merupakan faktor penting yang menentukan tipe sistem kepartaian. Kaitan yang erat antara parpol dengan pemilu antara lain ditunjukkan oleh Maurice Duverger⁵⁵, ia menyatakan pendapatnya bahwa partai politik dan pemilihan umum merupakan dua realitas yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, dan bahkan kadang-kadang sulit pula untuk memisahkan guna keperluan analisa, sebagai contoh tingkat ketepatan

⁵⁴ Ibid

dalam badan perwakilan rakyat tergantung pada sistem pemilihan dan sistem kepartaian.

Sedangkan partai politik yang demokratis dalam menghubungkan rakyat dengan proses politik adalah dengan melalui pemilihan umum akan dapat terselenggara hanya dengan adanya partai-partai politik. Dimana dalam hal ini partai politik berkedudukan sebagai kontestan pemilihan umum, Harris G. Warren dan kawan-kawannya mengemukakan pendapatnya bahwa :

“Elections are the occasions when citizens choose their officials and decide what they want the government to do. In making these decisions, citizens determine what rights they want to have and keep⁵⁶.”

Apa yang dikemukakan oleh Warren dan kawan-kawannya tersebut pada intinya lebih kurang menyatakan bahwa pemilu adalah merupakan kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusan itu mereka menginginkan untuk dimiliki.

Sehubungan dengan pemilu A. Sudiharto Djiwandono mengemukakan pendapatnya bahwa :

Pemilu adalah sarana demokrasi yang penting; ia merupakan perwujudan nyata keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.⁵⁷ Pada saat sekarang ini memang tidak dimungkinkan rakyat untuk terlibat secara langsung dalam kehidupan kenegaraan. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya jumlah penduduk suatu negara, sehingga tidak dimungkinkan untuk melibatkan mereka seluruhnya secara langsung dalam kehidupan kenegaraan.

⁵⁶ Harris G. Warren, et-al, *Our Democracy at Work*, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, N.J., 1963, hal. 67.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In addition, the document outlines the procedures for handling discrepancies. If there is a difference between the recorded amount and the actual amount, it is crucial to investigate the cause immediately. This could be due to a clerical error, a missing receipt, or a change in the terms of the agreement.

The final section provides a summary of the key points and offers some practical advice for ensuring the accuracy and reliability of the financial records. It stresses the need for regular audits and the importance of keeping all documents in a secure and accessible location.

The second part of the document details the specific steps involved in the reconciliation process. It starts with a comparison of the bank statement to the company's ledger. Each entry is checked for accuracy, including the date, amount, and description.

Any differences are noted and investigated. Common causes include bank charges, interest, or errors in the company's records. Once the cause is identified, the necessary adjustments are made to bring the records into balance.

The third part of the document discusses the importance of maintaining up-to-date records. It highlights that accurate records are essential for making informed business decisions and for complying with tax regulations.

The document also provides information on how to handle changes in the data. If there is a correction or an update, it is important to document the change and ensure that all relevant parties are notified.

The fourth part of the document offers some tips for improving the efficiency of the record-keeping process. It suggests using standardized forms and codes to make data entry easier and less prone to error.

It also recommends regular reviews and updates of the records to ensure that they remain current and accurate.

The fifth part of the document provides a detailed explanation of the various types of records that should be maintained. This includes sales records, purchase records, and records of all other financial transactions.

It also discusses the importance of keeping records of non-financial transactions, such as contracts and agreements, as these can be important for legal and tax purposes.

The sixth part of the document discusses the role of technology in record-keeping. It highlights the benefits of using accounting software to automate data entry and generate reports.

It also provides information on how to choose the right software for your business and how to ensure the security of your data.

The final part of the document provides a summary of the key points and offers some final thoughts on the importance of accurate record-keeping. It emphasizes that good record-keeping is a fundamental part of any successful business.

The document concludes with a list of resources for further information and a contact page for the author.

Hal ini juga tak lepas dari pernyataan Deliar Noer, ia mengatakan bahwa jumlah penduduk atau warga negara yang begitu banyak sehingga tidak mungkin mereka berhimpun disatu tempat pada saat yang sama untuk melakukan permusyawaratan, perhatian yang sama pun untuk membahas masalah bersama tidak mungkin diharapkan dari para warga negara yang bersangkutan, apabila mengingat ruang kerja pemerintah negara yang sudah begitu meluas sehingga dikehendaki kegiatan-kegiatan harian secara sepenuhnya dari pemerintah serta lembaga perwakilan sendiri guna menghadapinya.⁵⁸

Dengan demikian berarti pula bahwa pemilihan umum merupakan sarana yang penting untuk melibatkan rakyat dalam kehidupan kenegaraan, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan jalannya roda pemerintahan. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa *sistem pemilihan merupakan faktor penting yang menentukan tipe sistem kepartaian*. Dimana sistem pemilihan perwakilan proporsional (*proposional representation*, selanjutnya disingkat PR) dengan sistem multi partai disatu pihak, serta antara pemilihan distrik (*single member district*) dengan sistem dua partai dipihak lain. Dalam hubungannya dengan sistem pemilihan distrik, V.O. Key mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dalam pemilihan sistem distrik hanya ada dua partai yang mampu bersaing untuk memperoleh kemenangan, partai ketiga hampir selalu ditakdirkan untuk kalah kecuali bila partai tersebut dapat menyerap anggota-anggotanya dari salah satu partai utama, yang secara demikian berarti menjadi salah satu dari dua partai utama itu sendiri. Partai-partai tidak akan

mampu berkembang dalam suasana kepastian akan kekalahan. Prospek yang demikian itu cenderung mengerakkan anggota-anggota partai minoritas untuk berpindah pada partai mayoritas. Oleh karena itu, sistem pemilihan distrik cenderung mengakibatkan terbentuknya sistem dua partai.

Ditambahkan pula, bahwa dalam sistem PR, tumbuhnya sistem multi partai disebabkan karena tidak adanya kendala bagi partai-partai kecil ditambah pula dengan adanya dorongan bagi semua kelompok untuk turut serta dalam pemilihan. Partai-partai kecil tersebut dapat memperoleh perwakilan dalam badan legislatif dibawah sistem PR. Mereka mendapatkan bahwa banyak diantara partai-partai tersebut tidak mampu menempatkan calon tunggalnya didalam pemilihan yang memakai sistem distrik.

Sedangkan Maurice Duverger⁵⁹ memakai pendekatan dengan konsep polarisasi dan depolarisasi. Polarisasi terdapat pada sistem suara mayoritas dan merupakan hasil dari proses dua tingkat (*two fold proses*). *Fase pertama* dari proses ini disebut sebagai proses "mekanis", proses tersebut menghasilkan fenomena "over-representation" dan "under representation". Duverger mencoba untuk menunjukkan bahwa presentase jumlah kursi yang dimenangkan oleh partai-partai mayoritas, mereka cenderung mengalami over representation. *Fase kedua* meliputi apa yang disebut sebagai faktor 'psikologis'. Disini pemilih melihat bahwa partai-partai kecil menghadapi prospek yang kurang menguntungkan.

⁵⁹ Maurice Duverger, *Political Parties: A Study of Their Political and Social Functions* (London: Methuen, 1954).

Bagi Indonesia, pilihan sistem pemilu⁶⁰ distrik sebagai aspek reformasi politik menuju demokrasi, didasarkan kepada peluang yang diberikannya untuk menghilangkan kelemahan sistem pemilu proporsional, baik secara langsung maupun dampak tidak langsung. Langkah ini perlu diambil, karena penyalahgunaan sistem pemilu proporsional sudah membangun jaringan dan kultur *vested interest*, sehingga amat sukar dihilangkan melalui revisi sistem itu sendiri. Kendatipun penggunaan sistem distrik merupakan reformasi mendasar, akan tetapi itulah cara untuk menghilangkan penyalahgunaan sistem pemilu proporsional yang bersifat mendasar, sehingga hakekat sistem itu hilang dalam praktiknya, sebagaimana dibuktikan oleh mandulnya sistem pemerintahan perwakilan yang *otoritarian* atau *demokrasi formalitas*.⁶¹

Sebagaimana layaknya sebuah pemilu terselenggara, tentunya ada beberapa pra-syarat terlebih dahulu harus disiapkan. Diantara persiapan itu yang paling pokok dan langsung adalah adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang diterapkan demi kelancaran proses pemilihan umum tersebut. Sebagaimana yang telah diterapkan dalam UU. No. 3 tahun 1999, bahwa sistem pemilu untuk pemilihan anggota DPR, DPRD I dan DPRD II digunakan sistem *proporsional* berdasarkan *steisel daftar*.⁶²

⁶⁰ Urgensi Pemilu ini merupakan suatu keharusan untuk memenuhi cita-cita nasional, karena pemilu adalah alat untuk menyempurnakan demokrasi yang pada akhirnya mengarah kepada tercapainya masyarakat adil dan makmur, Soekarno, 1958, "*Pemilu dan Kesatuan Nasional*". Dalam "Langkah Merah" Subhan sd. Bentang Budaya, Yogyakarta, 1996, hal. 54.

⁶¹ Arbi Sanit, *Reformasi Politik Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hal. 93.

⁶² Arbi Sanit, *Reformasi Politik Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hal. 93.

Dikatakan pula bahwa pemilu diselenggarakan secara demokratis dan transparan, berdasarkan asas jujur, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sedangkan yang dimaksud dengan asas pemilu tersebut dijelaskan di dalam UU No. 3 tahun 1999 adalah :

1) Jujur

Dalam penyelenggaraan Pemilu Umum, penyelenggaraan/ Pelaksanaan Pemerintah dan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Pengawas dan Pemantau Pemilihan Umum, Termasuk Pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2) Adil

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, setiap pemilih dan Partai Politik.

3) Langsung

Rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

4) Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam Pemilihan Umum. Warga negara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. Pemilihan yang bersifat umum mengandung

semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras golongan, jenis kelamin, kedaerahan dan status sosial.

5) Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

6) Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada saat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.

b. Fungsi Pemilihan Umum

Salah satu bentuk partisipasi politik rakyat dalam pemerintahan yang demokratis adalah keikutsertaan anggota masyarakat dalam pemilu. Dalam sistem politik semacam politik semacam ini pemilu

Pertama, pemilu merupakan institusi dan sekaligus instrumen untuk mengendalikan konflik kepentingan yang terjadi dalam masyarakat. *Kedua*, pemerintahan secara wajar dan damai. *Ketiga*, pemilu dalam pengertian yang lebih luas lagi merupakan sarana untuk membangun basis legitimasi politik yang konstitusional bagi kekuasaan yang akan dibangun. *Keempat*, melalui pemilu juga dapat dilihat tingkat kedewasaan dan kemantapan budaya politik nasional yang disosialisasikan kepada rakyat selama kurun waktu pemerintahan yang lalu. *Kelima*, terutama melalui kampanye pemilu masyarakat berpeluang memperoleh banyak informasi tentang berbagai kebijakan dan permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara dalam mewujudkan kesejahteraan warganya.⁶³

c. Pemilihan Umum dan Demokrasi

Sudah menjadi kebiasaan dalam ilmu politik bahwa satu negara bisa disebut demokratis kalau terdapat partai-partai politik. Sebab kehadiran parpol berarti ada pengakuan penguasa akan hak warga negara untuk berbeda pendapat.⁶⁴ Akan tetapi adanya parpol pun belum cukup untuk mengukur sistem politik itu demokratis. Syarat yang tidak kalah pentingnya adalah partai-partai politik tersebut dapat berkompetisi dalam suatu pemilu yang bebas.⁶⁵ Oleh karena itu hampir semua ilmuwan politik sepakat bahwa pemilu merupakan satu kriteria penting untuk mengukur kadar demokrasi sebuah sistem politik.

Namun disisi lain tidak bisa dipungkiri, banyak negara-negara yang melaksanakan pemilu hanya sekedar formalitas politik belaka, yang tujuannya hanya untuk melegitimasi kekuasaan bukan untuk menegakkan demokrasi. Dalam negara seperti ini pemilunya pun

⁶³ J. Kristiadi, *Menyelenggarakan Pemilu yang Bersifat Luber dan Jurdil*, C 515, Jakarta, 1997, hal. 1.

direkayasa sedemikian rupa agar partai yang didukung pemerintah bisa menang. Tentu saja pelaksanaan pemilu semacam ini sulit sekali mengukur kadar demokrasi sebuah sistem politik.

Agar pemilu dapat benar-benar menjadi sarana untuk mewujudkan kehidupan politik yang demokratis, dalam pelaksanaannya harus disertai dengan beberapa persyaratan. Menurut J. Kristiadi setidaknya ada tiga persyaratan sebagai berikut :

Pertama, pemilu harus dilaksanakan secara reguler serta dalam suasana kehidupan politik yang memungkinkan partai-partai bersaing secara sehat. *Kedua*, pemilu diselenggarakan oleh lembaga di luar pemerintah sehingga tidak menimbulkan kontrapeksi yang mengakibatkan meluasnya tuduhan terhadap satu partai. *Ketiga*, partai-partai politik mempunyai kesempatan yang sama untuk eksis dan membangun komunikasi langsung dengan masyarakat.

Sedangkan Rusli Karim memberikan kriteria pemilu yang demokratis adalah sebagai berikut :

Pertama, memberikan keleluasaan kepada rakyat dalam menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan. *Kedua*, perlakuan yang sama oleh penyelenggara pemilu terhadap semua kontestan. *Ketiga*, adanya kemampuan yang relatif sama antara kekuatan politik untuk saling berkompetisi di dalam pemilu, sehingga pemilu bukan sekedar melegitimasi status quo tetapi juga memberikan peluang bagi pergeseran dan pergantian kekuasaan. *Keempat*, penyelenggaraan kampanye yang terbuka. *Kelima*, kesiapan warga negara untuk terlibat dalam politik sesuai dengan hak dan kewajiban serta tunduk pada aturan main yang ada. *Keenam*, perhitungan dan pelaporan hasil suara secara jujur.

Disamping kedua pendapat di atas, yang mensinyalir tentang pemilu yang demokratis adalah T.A. Legowo menurutnya bahwa untuk mengukur pemilu yang demokratis dapat dilihat dari :

Pertama, sebagai aktualisasi kedaulatan rakyat pemilu seharusnya

Banyaknya warga negara yang terlibat atau tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam politik dapat mendorong ke arah sistem politik yang demokratis, dengan catatan, partisipasi masyarakat tadi bukan hasil mobilisasi atau tekanan dari pihak-pihak tertentu.

Kedua, sebagai pengungkapan kehendak rakyat yang berdaulat, pemilu seharusnya memberikan jaminan atas hak dan kebebasan pemilih dalam menentukan pilihannya. Pemilu yang jujur dan adil membuka peluang yang sama bagi setiap warga negara terlibat dalam proses itu, dan menjamin pemilihan yang luber.

Ketiga, sebagai mekanisme demokratis untuk memilih wakil-wakil, pemilu sebaliknya menjadi ajang kompetitif bagi calon-calon wakil atau parpol-parpol untuk memperoleh sebanyak mungkin dukungan pemilih. Pemilu yang adil memberikan peluang dan fasilitas yang sama kepada mereka yang bersaing dalam proses pemungutan suara ini.

Keempat, sebagai sarana membentuk perwakilan, pemilu seharusnya menghasilkan keterwakilan unsur-unsur penduduk dan daerah-daerah. Pemilu yang integrative membuat setiap unsur penduduk dan daerah terwakili aspirasi dan kepentingan mereka dalam perwakilan.

Dari uraian di atas dapatlah disebutkan bahwa, pemilu dapat dikatakan demokratis jika :

1. Dilaksanakan secara reguler
2. Adanya lembaga independen penyelenggara pemilu
3. Pemilu dilaksanakan secara terbuka sebagai pemenuhan

4. Kampanye yang terbuka
5. Penghitungan dan pelaporan suara yang jujur
6. Menghasilkan keterwakilan penduduk dan daerah
7. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi
8. Kebebasan menentukan pilihan
9. Pemilu dijadikan sebagai arena kompetisi yang sehat.

Untuk menciptakan pemilu yang demokratis, sebagaimana yang telah diuraikan di atas tidak akan lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, dan sekaligus menjadi kajian dalam penelitian ini.

Pertama, peraturan pemilu.⁶⁶ Peraturan pemilu ini sangat penting karena sebagai pondasi atau pedoman yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu maupun kepartaiannya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah peraturan yang dapat menjamin bagi terlaksananya pemilu yang demokratis.

Peraturan pemilu yang mampu menjamin nilai dan kepentingan pemilik hak politik adalah perundang-undangan pemilu yang memenuhi tiga persyaratan, yaitu lengkap unsur substansinya, sekaligus memberikan persamaan kesempatan dan persamaan hasil konkrit yang diperoleh dan tidak membolehkan interpretasi sepihak oleh siapapun.⁶⁷

⁶⁶ Yang dimaksud dengan peraturan pemilu dalam tulisan ini adalah perundang-undangan yang memiliki hubungan langsung dengan pemilu. Perundang-undangan yang dimaksud adalah UU Partai Politik, UU tentang Pemilu dan UU tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Kelengkapan substansi peraturan pemilu berarti memuat peraturan tentang jaminan kepentingan golongan, jaminan hak asasi dan jaminan demokratisasi. Dengan begitu nilai dan kepentingan penguasa dapat terjamin, sebagaimana nilai dan kepentingan penyandang hak politik. Memberikan kesempatan dan hasil yang sama kepada semua warga negara berarti setiap peraturan pemilu sekaligus menjamin hasil dan proses interaksi antar penyandang hak politik, secara jujur. Sedangkan larangan interpretasi sepihak berarti setiap peraturan mempunyai kejelasan dan kepastian pengertian dan prosedur yang harus diikuti oleh semua pihak pemilik hak politik. Pengertian tunggal dan prosedur baku dikehendaki oleh peraturan pemilu yang berorientasi pada pemilu yang demokratis. Perbedaan interpretasi hanya bisa diselesaikan oleh pengadilan yang bebas.

Kedua, proses pemilu. Baik secara formal (teoritis) maupun dalam kenyataan (realistis) proses pemilu itu secara umum meliputi : pendaftaran pemilih, pencalonan anggota legislatif, kampanye pemilu, penyerahan suara dan penghitungan suara. Proses ini lebih dikenal dalam bahasa sehari-hari adalah pentahapan pemilu.

Dalam tahapan pemilu seperti yang diuraikan diatas, banyak celah-celah untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Agar tercipta pelaksanaan pemilu yang demokratis, perlu diperhatikan hal-hal tertentu.

Pertama, dalam pendaftaran pemilih harus terkontrol oleh OPP dan masyarakat secara efektif dengan menggunakan sistem manajemen

kecurangan, khususnya mobilisasi masyarakat oleh penyelenggara pemilu ataupun pemaksaan-pemaksaan terhadap para calon pemilih dalam pemilihan umum. *Kedua*, dalam pencalonan OPP harus mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk menentukan calon-calon yang dimaksudkan dalam daftar anggota legislatif. Campur tangan pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu tidak sejalan dengan kemandirian OPP dan akan mengakibatkan calon yang terpilih menjadi anggota legislatif akan merasa berhutang budi kepada pemerintah dan tidak merasa perlu terikat kepada rakyat pemilih dalam menunaikan tugasnya di lembaga legislatif. Disini penelitian khusus terhadap calon wakil diparlemen tidaklah dibenarkan. *Ketiga*, dalam kampanye harus menegakkan keadilan dari pemerintah terhadap semua OPP tanpa pandang bulu. *Keempat*, para pemilih (pada hari pemungutan suara) harus terhindar dari rasa takut. Hambatan kebebasan dari rasa takut tersebut bersumber pada perlakuan terhadap memilih sebagai kewajiban. Pemilih yang mengalami rasa takut mengkhawatirkan ketidakikutannya memilih dalam pemilu akan berakibat kesukaran dalam berurusan dengan aparat, terkucil dari kelompok dan lainnya. Pemilih yang bekerja pada instansi pemerintah dan swasta akan merasa takut akan "hukuman" berupa teguran sampai pada ancaman fasilitas jika tidak memilih OPP yang dianjurkan pimpinannya. Oleh karena itu, demokratisasi penyerahan suara seharusnya meniadakan segala bentuk ancaman baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebebasan pemilih untuk menentukan pilihannya. *Kelima*, keterbukaan dan

d. Perbandingan Sistem Pemilu Orde Baru dan Orde Reformasi

Pemilihan umum yang dibangun pada masa orde baru dengan menganut sistem proporsional berimbang. Sistem pemilihan umum pada masa ini, proses pemilihan anggota DPR-RI, Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan melalui perwakilan (*Representatif demokrasi*) melalui pertimbangan inilah maka kemudian melahirkan ide untuk melaksanakan pemilihan presiden secara langsung.

Adapun beberapa kekurangan-kekurangan dan kelebihan pemilu orde baru yakni :

- 1) Cara pemilihan Presiden pada masa ini rakyat hanya memilih tanda gambar partai sehingga rakyat tidak punya kesempatan untuk mengetahui siapa saja yang menjadi wakil-wakil mereka di DPR/RI point inilah yang dianggap rakyat bahwa pemilu dianggap kurang demokratis. Kelebihannya pemilu ini hanya dilaksanakan satu kali dalam lima tahun yang otomatis secara waktu dan finansial cukup efektif.
- 2) Sistem pemilihan dilaksanakan dengan sistem perwakilan artinya proses pemilihan dan pengangkatan anggota DPR/RI dilaksanakan oleh partai politik yang menang.
- 3) Dalam memilih presiden rakyat tidak dapat memilih presidennya yang mencalonkan dan memilih presiden adalah fraksi-fraksi yang ada di DPR/MPR-RI sebagai representasi dari rakyat.⁶⁸

Ada banyak perbaikan-perbaikan sistem pemilu pada masa orde reformasi ini terutama pada pemilu 2004 saat ini. Sesuai dengan apa yang dimuat dalam Undang-Undang Pemilu No. 12 dan No. 23 tahun 2003 tentang pemberlakuan UU pemilu yang baru point-point penting perbaikan tersebut dapat dilihat di dalam penjelasan dibawah ini.

Berikut kelebihan-kelebihan pemilu masa orde reformasi yaitu :

- 1) Cara pemilihan yang baru, sekarang orang tidak hanya memilih sebuah partai, lalu partai itu yang menentukan siapa-siapa yang akan menduduki jabatan dilembaga legislatif tersebut. Meskipun mencoblos tanda gambar partai saja sudah dianggap sah, namun ada kolom untuk memilih nama orang yang dianggap paling bisa dipercaya mewakili kepentingan rakyat.
- 2) Rakyat memilih langsung Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD). DPD adalah lembaga yang dibuat agar lebih menampung dan menjalankan keinginan rakyat. Lembaga ini adalah pengganti MPR yang dulu anggotanya lebih banyak ditunjuk oleh Presiden dari pada oleh rakyat sehingga tidak sungguh-sungguh menjalankan amanat rakyat.
- 3) Rakyat memilih langsung Presidennya. Tiga bulan setelah pemilu untuk anggota DPR, DPRD dan DPD, maka rakyat dipersilahkan untuk memilih seseorang secara langsung untuk menjabat sebagai Presiden. Tentu saja ini adalah lompatan besar kehidupan politik

... 2004 ini bangsa kita akan memilih

F. Definisi Konsepsional

Konsep diartikan oleh Sofyan Efendi sebagai berikut : “generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat di pakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama”,⁶⁹

1. Demokrasi adalah pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat yaitu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
2. Demokratisasi adalah proses digantinya pemerintah/sistem politik yang otoriter dengan pemerintahan yang demokratis.
3. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama dan bertindak sebagai suatu kesatuan politik
4. Pemilu legislatif adalah sarana demokrasi yang penting sebagai perwujudan nyata ke ikut sertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan untuk terlibat secara langsung dengan menyalurkan aspirasinya untuk memilih wakil-wakilnya (anggota legislatif) untuk duduk di dalam pemerintahan (DPR / lembaga legislatif).
5. Strategi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam meningkatkan perolehan suara.
 - a. Meneguhkan kepemimpinan partai.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana mengukur suatu variabel.⁷⁰

Dengan demikian agar suatu penelitian dapat diukur variabelnya maka perlu dioperasionalkan terlebih dahulu. Sedangkan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabelnya dalam penelitian ini yaitu strategi PAN dalam meningkatkan perolehan suara pada pemilu legislatif 2004 di Kabupaten Sleman, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Meneguhkan Kepemimpinan Partai :
 - a. Figur kepemimpinan Partai Amanat Nasional.
 - b. Peran pemimpin Partai Amanat Nasional.
 - c. Pembinaan dan kaderisasi pemimpin Partai Amanat Nasional (PAN).
 - d. Menciptakan citra dan brand image (ciri khas) PAN di masyarakat.
 2. Menyusun Program dan Kegiatan Sosialisasi Politik Partai Amanat Nasional
 - a. Tahap Sosialisasi dan Aksi
 - b. Membangun manajemen dan sistem informasi.
 - c. Penggalangan massa.
 - d. Strategi sosialisasi politik Partai Amanat Nasional
-

3. Merekrut Anggota Pemula

- a. Membentuk badan-badan otonom.
- b. Mendirikan pos pandu untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak, khususnya masyarakat yang membutuhkan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Adapun penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kilas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

2. Unit Analisis Data

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yakni strategi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam meningkatkan perolehan suara pada pemilu legislatif 2004 di Kabupaten Sleman, maka yang menjadi unit analisis data adalah individu (anggota masyarakat) yang memilih Partai Amanat Nasional pada pemilu legislatif 2004 di Kabupaten Sleman atau jumlah individu yang memilih PAN yang dapat diidentifikasi dari

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for transparency and accountability, particularly in financial matters. The text notes that without clear documentation, it becomes difficult to track expenses and revenues, which can lead to errors and potential legal issues.

2. The second section focuses on the role of technology in modern record-keeping. It highlights how digital tools and software solutions have revolutionized the way data is stored and accessed. These technologies not only improve efficiency but also enhance the security of information. The document suggests that organizations should invest in reliable digital systems to ensure their records are both accessible and protected.

3. The third part of the document addresses the challenges associated with data management. It points out that as the volume of data grows, it becomes increasingly difficult to organize and retrieve information. The text offers several strategies to overcome these challenges, such as implementing robust data governance policies and using advanced search and filtering capabilities. It also stresses the importance of regular data audits to ensure accuracy and relevance.

4. The final section discusses the legal and regulatory requirements for record-keeping. It notes that various industries and jurisdictions have specific rules regarding the retention and disposal of records. Organizations must stay up-to-date with these regulations to avoid penalties and ensure compliance. The document provides a general overview of these requirements and suggests consulting with legal counsel for more detailed guidance.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sleman dengan beberapa pertimbangan yaitu :

- a. Bahwa perkembangan dari waktu ke waktu Partai Amanat Nasional (PAN) dalam gerakan dan tujuannya yang sangat tepat dan relevan serta dengan sistem dan mekanisme serta kinerja yang baik membuat Partai Amanat Nasional (PAN) mampu menjadi salah satu Partai terbesar dan eksis di dunia perpolitikan di Indonesia.
- b. Bahwa di Kabupaten Sleman merupakan basis Partai Amanat Nasional (PAN) terbesar di wilayah Yogyakarta. Dimana di Kabupaten Sleman perolehan suara Partai Amanat Nasional memperoleh suara terbanyak daripada Kabupaten-kabupaten lain, meskipun ada penurunan suara dari pemilu sebelumnya. Pada Pemilu 1999, PAN Kabupaten Sleman menempati peringkat kedua setelah PDI-P dengan jumlah perolehan suara sebanyak 98.495 suara atau 18,79 %, sehingga dapat menempatkan anggota legislatifnya sebanyak 8 orang. Pada Pemilu 2004 terjadi penurunan jumlah kursi di DPRD Sleman dari 8 kursi menjadi 7 kursi lebih disebabkan karena faktor strategi, karena secara

Pada Pemilu 2009, PAN Sleman mengalami kesulitan dihadapkan dengan

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden dan berupa keterangan dari pihak-pihak terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Adapun responden dalam penelitian ini adalah masyarakat dan jajaran pimpinan DPD PAN Kabupaten Sleman.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, mass media, makalah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview

Yang di maksud metode interview adalah proses Tanya jawab lisan dalam mana ada dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat mitra yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri.⁷¹

Jadi metode interview merupakan teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab langsung terdiri dari dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik dalam kedudukan yang berbeda, yaitu antara penulis dengan interview dengan subyek penelitian yang telah ditentukan. Jadi teknik pengumpulan data untuk informasi yang

diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada ketua DPD PAN di Kabupaten Sleman dan Sekretaris.

b. Dokumentasi

Dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menjabarkan teori-teori, bahan-bahan, serta peraturan-peraturan dan informasi lain yang diperoleh dari buku-buku dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini sehingga sangat dibutuhkan AD/ART dari hasil rapat PAN.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian tentang strategi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam meningkatkan perolehan suara pada pemilu legislatif 2004 di Kabupaten Sleman ini menggunakan tehnik analisis kualitatif, menurut Koentjaraningrat, analisis dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu analisa kualitatif dan kuantitatif.

“Apabila data yang dikumpulkan itu hanya sedikit bersifat monografis atau terwujud kasus-kasus (sehingga dapat disusun dalam struktur klasifikasi) maka analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif. Tetapi apabila data yang dikumpulkan itu berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori maka analisa kuantitatiflah yang digunakan”.

Penelitian kualitatif menurut Bagdan dan Taylor adalah sebagai produk penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

... dan perilaku yang dapat diamati

menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik utuh.⁷²

Dalam menganalisa penelitian ini penulis menggunakan tehnik analisa kualitatif interpretatik yaitu dengan cara mengkualifikasikan data yang diperoleh kemudian menganalisa sesuai dengan segala dari obyek yang diteliti dan menginterpretasikan fenomena-fenomena yang ada. Sehingga dari interpretasi ini dapat memberikan suatu deskripsi, gambaran secara holistik mengenai masalah yang diteliti. Dengan membuat pengklasifikasikan dalam tehnik analisa data ini dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam menganalisa permasalahan secara sistematis.